



BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2022 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja
- 5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VII PENUTUP



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 sebesar 6,98%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 sebesar 3,09%;
3. *Gini Ratio* Tahun 2022 sebesar 0,297%;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 sebesar 68,28 %;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2021 sebesar (0,56)%;
6. Tingkat Inflasi Tahun 2022 sebesar 4,63%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2021 sebesar Rp 16,487 Triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Kabupaten Karangasem (%)	5,91	6,78	6,98	0,20
2	Kabupaten Karangasem (Ribu Orang)	24,69	28,52	29,45	0,93
3	Provinsi Bali (%)	3,78	4,53	4,57	0,04
4	Nasional (%)	9,78	9,71	9,57	(0,14)
5	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Persentase penduduk miskin Kabupaten selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan terus, dimana pada Tahun 2020 sebesar 5,91, Tahun 2021 sebesar 6,78%, dan tahun 2022 sebesar 6,98%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem masih di atas provinsi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Karangasem	0,52	0,64	0,84	0,20
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,52	0,68	0,62	(0,06)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	6	6	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Karangasem	0,06	0,08	0,18	0,10
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali	0,10	0,15	0,13	(0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0,38	(0,04)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	4	2	8	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (**Tingkat Pengangguran Terbuka**) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem TPT Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah sebesar 3,09%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Karangasem (%)	2,42	2,32	3,09	0,77
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (%)	5,63	5,37	4,80	(0,57)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	(0,63)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	2	2	3	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

TPT di Kabupaten Karangasem Tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 2,42%, di Tahun 2021 turun menjadi sebesar 2,32%. Di Tahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar 3,09%. Meskipun demikian, angka TPT Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sudah mencapai angka sebesar 4,80%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah sebesar 0,297 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Tingkat Kabupaten Karangasem	0,327	0,318	0,297	(0,02)
2	Tingkat Provinsi Bali	0,369	0,378	0,363	(0,01)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Gini Ratio yang disajikan adalah tahun 2020, 2021, dan 2022 dimana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem selama 3 tahun tersebut mengalami penurunan per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi, capaian yang diperoleh tiap tahunnya selalu rebih rendah.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60); b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$); c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah sebesar 68,28 poin dengan kategori sangat sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Kabupaten Karangasem	67,35	67,36	68,28	0,92
2	Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	0,75
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Karangasem

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2022 adalah sebesar 68,28 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 67,36 poin mengalami kenaikan sebesar 0,92 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,89 tahun pada Tahun 2022, lebih lama tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,67 tahun dengan harapan lama sekolah 12,62 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp10.278.000 atau turun sebesar Rp 103.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Karangasem pada saat ini berada pada urutan 9 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2020 IPM yang dicapai masih di angka terendah se Provinsi Bali, yaitu di urutan 9 dengan IPM sebesar 67,35%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Kabupaten Karangasem		Provinsi Bali	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	10.630,37	10.570,60	143.870,40	11.120.077,90
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(4,45)	(0,56)	(-2,46)	3,70

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali

Sampai laporan ini disusun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2022 belum dirilis oleh BPS, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi yang disajikan adalah Tahun 2021 dan 2020. Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Karangasem mengalami penurunan rata-rata 5,01%. Dalam laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem lebih baik di Tahun 2021 dibandingkan dari laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.

2.1.6 Laju Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Karangasem dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit di kendalikan. dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem didekati dengan tingkat inflasi Singaraja yang memiliki karakteristik cenderung sama. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah sebesar 4,63% dengan kategori sedang dengan berdasarkan inflasi kota Singaraja sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun(%) 2022 thd 2021
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem (%)	2,48	2,39	4,63	2,24
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	-	5,75	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%) 2022 thd 2021
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tingkat inflasi Kabupaten Karangasem mengikuti Kota Singaraja, dimana pada Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,63%, sedangkan pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,39%, dan di Tahun 2020 sebesar 2,48%. Secara umum, tingkat inflasi Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Bali yang sudah mencapai sebesar 5,75% pada Tahun 2022.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Karangasem

Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.333.468,96	4.512.819,64
2	Pertambangan dan Penggalian	516.243,05	554.412,55
3	Industri Pengolahan	672.598,87	684.233,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.732,36	15.350,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.181,20	21.951,57
6	Konstruksi	1.083.686,64	1.180.143,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	901699,06	906871,86
8	Transportasi dan Pergudangan	2824769,48	2591359,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.366.240,43	1.222.597,98
10	Informasi dan Komunikasi	586.216,99	622.129,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	735.908,33	749.128,47
12	Real Estate	671.709,31	687.830,33
13	Jasa Perusahaan	129.302,75	128.621,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.334.474,39	1.366.501,78
15	Jasa Pendidikan	448.049,20	456.813,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373.389,29	403183,08
17	Jasa lainnya	392.104,53	383.675,62
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	16.407.774,86	16.487.624,87
19	PDRB Provinsi	223.900.894,64	219.800.030,51

2020 : Angka Sementara

2021 : Angka Sangat Sementara

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.2 Kebijakan Keuangan

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah, indikator tersebut diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesenjangan ekonomi.



Dengan adanya wabah virus Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Covid-19 sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Covid-19 terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan dengan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak pandemic Covid-19 yang sudah diambil oleh Pemerintah yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bali yang menitikberatkan perekonomiannya dari sektor pariwisata menjadi pukulan yang berat karena dengan ditutupnya penerbangan dan daerah tujuan wisata, berakibat menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata dan berdampak juga pada sektor-sektor yang lain, begitu juga dengan Kabupaten Karangasem yang mengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata, pertanian dan pertambangan juga akan mengalami penurunan produksi.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2022, dan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali, serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem khususnya pasca mewabahnya pandemi Covid -19, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan mandiri, pengembangan SDM yang handal, pembangunan pariwisata dan budaya, didukung Infrastruktur yang memadai yang difokuskan pada 7 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Bidang Sandang, Pangan dan Papan;
2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya;
5. Bidang Pariwisata;
6. Penguatan Infrastruktur;
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pengaruh Pandemi Virus Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh belahan dunia menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Karangasem dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat wabah Covid-19 di mana sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Karangasem setelah sektor Pertambangan.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi tahun 2022 difokuskan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Karangasem akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan perekonomian diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis.



Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini di samping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2022 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi multiplier efek terhadap bergairahnya kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Juru Sita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
4. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
5. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan
6. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata serta ekonomi kreatif, pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam



penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Sehingga arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karangasem disinergikan dengan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali dan Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut:

1. Aktivitas perekonomian diharapkan bisa berangsur-angsur pulih kembali seiring dengan kebijakan dibukanya kembali sektor pariwisata pada pertengahan tahun 2021;
2. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu mendorong swasembada pangan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemi Covid - 19;
3. Arah Kebijakan pembangunan nasional dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang diarahkan pada sektor Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan serta Reformasi Kesehatan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat;
4. Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem;
5. Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat;
6. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan berbasis kompetensi bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

7. Penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi; dan
8. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca Covid-19;
4. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah melalui pemenuhan 25% infrastruktur yang bersumber dari dana transfer yang bersifat umum;
5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC;
7. Mendorong pembangunan dalam bidang pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan kualitas hasil pertanian, dan menjaga serta mengendalikan stabilitas harga komoditas pertanian melalui fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat menampung hasil komoditas pertanian dari hulu sampai hilir;
8. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata;
9. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial khususnya dalam rangka menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam, maka anggaran difokuskan untuk pencegahan, penanggulangan dan ketahanan bencana daerah;
10. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid-19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja;
11. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 11,5 persen;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

12. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata; dan
13. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga tersebut.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2022, dan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali, serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem khususnya pasca mewabahnya pandemi Covid -19, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan mandiri, pengembangan SDM yang handal, pembangunan pariwisata dan budaya, didukung Infrastruktur yang memadai yang difokuskan pada 7 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Bidang Sandang, Pangan dan Papan;
2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya;
5. Bidang Pariwisata;
6. Penguatan Infrastruktur; dan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Karangasem tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2021. Selain kegiatan pembangunan masyarakat, anggaran juga digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta penanganan dampak inflasi. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 1 (satu) kali, yang mana disebabkan oleh penyesuaian terkait dengan alokasi anggaran pada rekening belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Perangkat Daerah (PD) yang mana belum sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya perlu ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran yaitu dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Tahun 2022 tanggal 22 April 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintah Daerah dan DPRD sepakat untuk melaksanakan perubahan anggaran dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022.

Rincian program dan kegiatan yang direncanakan atau telah dilaksanakan (termasuk anggaran per kegiatan) dalam penanganan Covid 19 adalah penanganan dampak inflasi melalui belanja wajib perlindungan sosial yaitu dialokasikan pada anggaran Penciptaan Lapangan Kerja serta pencegahan dan penanganan Covid 19.

Jumlah Anggaran dan rincian penanganan Covid-19:

1. Belanja dalam rangka penanganan perlindungan untuk kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja sebesar Rp3.665.000.000,00;
2. Belanja Pencegahan atau penanganan COVID 19 sebesar Rp1.939.584.912,00.

Target kinerja APBD Tahun 2022 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	1.545.248.459.347,00	1.587.473.591.277,00	42.255.131.930,00	3
Pendapatan Asli Daerah	232.405.766.744,00	253.884.957.846,00	21.479.191.102,00	9
Pendapatan Pajak Daerah	118.330.509.695,00	141.910.162.195,00	23.579.652.500,00	20
Hasil Retribusi Daerah	14.195.189.680,00	10.412.126.000,00	(3.783.063.680,00)	(27)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	9.099.897.759,00	9.620.904.738,00	521.006.979,00	6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.780.169.610,00	91.941.764.913,00	1.161.595.303,00	1
Pendapatan Transfer	1.278.690.892.060,00	1.305.565.130.932,00	26.874.238.872,00	2
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.924.793.000,00	1.098.828.749.000,00	(96.044.000,00)	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.766.099.060,00	206.736.381.932,00	26.970.282.872,00	15
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.151.800.543,00	28.023.502.499,00	(6.128.298.044,00)	18
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.151.800.543,00	28.023.502.499,00	(6.128.298.044,00)	18

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp21.479.191.102,00 atau 9%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi sumber-sumber PAD serta pendapatan transfer. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Hal tersebut didasarkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan; b. Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUPA Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan atas penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 12 Puskesmas.

Proyeksi anggaran atas Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kemampuan realisasi pada kondisi pandemi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

2. Anggaran Belanja

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja	1.592.775.322.771,00	1.703.162.034.813,04	110.386.712.042,04	7
Belanja Operasi	1.209.572.253.341,00	1.305.343.525.500,04	95.771.272.159,04	8
Belanja Pegawai	770.400.046.404,50	777.329.458.273,04	6.929.411.869,54	1
Belanja Barang dan Jasa	412.050.611.735,50	502.653.240.978,00	90.602.629.242,50	22
Belanja Hibah	19.351.195.201,00	18.886.426.429,00	(464.768.952,00)	-2
Belanja Bantuan Sosial	7.770.400.000,00	6.474.400.000,00	(1.296.000.000,00)	-17
Belanja Modal	165.696.493.678,00	183.107.974.999,00	17.411.481.321,00	11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.909.964.449,00	55.641.973.120,00	10.732.008.671,00	24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.294.192.942,00	39.950.260.866,00	9.656.067.924,00	32
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.249.854.881,00	86.781.854.881,00	1.532.000.000,00	2
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.242.481.406,00	733.886.132,00	(4.508.595.274,00)	-86
Belanja Tidak Terduga	10.788.533.464,00	4.123.533.464,00	(6.665.000.000,00)	62
Belanja Transfer	206.718.042.288,00	210.587.000.850,00	3.868.958.562,00	2
Belanja Bagi Hasil	17.229.340.918,00	21.011.011.030,00	3.781.670.112,00	22
Belanja Bantuan Keuangan	189.488.701.370,00	189.575.989.820,00	87.288.450,00	0

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp 110.386.712.042,04 atau 7%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp95.771.272.159,04, belanja modal sebesar Rp17.411.481.321,00, belanja transfer sebesar Rp3.868.958.562,00 serta penurunan pada belanja tidak terduga sebesar Rp6.665.000.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- b. Penanggulangan bencana pertanian dengan menyediakan anggaran untukantisipasi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- c. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- d. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2022.
- e. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
- f. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah, maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
- g. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- h. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
- i. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2023, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2023.

3. Anggaran Pembiayaan

Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	50.026.863.424,00	118.188.443.536,00	68.161.580.112,00	136



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.026.863.424,00	118.188.443.536,00	68.161.580.112,00	136
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	47.526.863.424,00	115.688.443.536,00	68.161.580.112,00	143

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dari anggaran induk. SiLPA mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. SiLPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2021.

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp118.188.443.536,94 meningkat sebesar Rp68.161.580.112,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp50.026.863.424,00.

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2022 yaitu digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT. BPD Bali sebesar Rp750.000.000,00. Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp1.500.000.000 PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp250.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp.118.188.443.536,00, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp115.688.443.536,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp(115.688.443.536,00).

2.3.2 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.3.2.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Dinas	382.508.570.364,00	353.282.417.400,22	92,36
Kesehatan			
Belanja Operasi	354.128.427.796,00	333.844.859.865,22	94,27
Belanja Pegawai	127.718.504.018,00	129.473.942.796,00	101,37
Belanja Barang dan Jasa	226.379.923.778,00	204.340.917.069,22	90,26
Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	100
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Belanja Modal	28.380.142.568,00	19.437.557.535,00	68,49
Total Belanja Daerah	1.703.162.034.813,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	22,46%	22,81	

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB (Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB) Kabupaten Karangasem.

Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap.

Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan.

Alokasi anggaran stunting tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp286.541.000,00 realisasi sebesar Rp159.462.000,00 (55.65%) yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik serta alokasi anggaran pada Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB sebesar Rp2.256.290.000,00 realisasi sebesar Rp1.253.273.500,00 (56%).

Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan AKSi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu Hamil KEK, dan balita usia 6 - bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian Vit A dan obat cacung pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk stop BABS.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/ S rendah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu yang ada yaitu 689 dan sudah terealisasi 370 kit tahun 2022 dan tahun 2023 sudah diusulkan kembali sebesar 331 dan usulan sudah di verifikasi pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

Capaian program pada Tahun 2022 adalah:

1. TTD ibu hami : 89,51%;
2. IMD : 60,1%;
2. Asi eksklusif : 76,2%;
3. Vitamin A Balita : 95,4%;
4. Vitamin A ibu Nifas : 99,9%;
5. D/S : 69,9%;
6. Gizi Kurang : 2,3%;
7. Gizi Buruk mendapat perawatan : 100%;
8. Ibu Hamil KEK mendapat PMT : 100%;
9. Balita Gizi Kurang dapat PMT : 100%;
10. Rematri mendapat TTD : 97,4%;
11. Ibu Hamil KEK : 5,4%; dan
12. Anemia Bumil : 7,9%.

2.3.2.2 *Mandatory Spending Fungsi Pendidikan*

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Dinas Pendidikan	601.084.504.570,00	550.786.548.677,80	91,63
Belanja Operasi	553.698.935.999,00	506.324.031.014,80	91,44
Belanja Pegawai	458.535.052.597,00	418.914.673.995,80	91,36
Belanja Barang dan Jasa	87.151.853.402,00	79.809.191.805,00	91,57
Belanja Hibah	7.762.030.000,00	7.600.165.214,00	97,91
Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal	47.385.568.571,00	44.462.517.663,00	93,83
Total Belanja Daerah	1.703.162.034.813,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	35,29%	35,56	

2.3.2.3 *Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur*

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Infrastruktur			
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	91.536.122.934,00	17.048.165.151,00	18,62
Belanja Barang dan Jasa	12.635.859.998,00	8.099.388.700,00	64,10
Belanja Hibah	6.000.000.000,00	5.880.000.000,00	98,00
Belanja Bantuan Keuangan	32.050.000.000,00	32.040.000.000,00	99,97
Belanja Modal	17.516.478.726,00	13.387.950.000,47	76,43
Total	159.738.461.658,00	76.455.503.851,47	47,86

2.3.2.4 *Mandatory Spending* Fungsi Aparatur

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada BKPSDM	6.594.810.332,00	5.834.832.792,00	88,48
Belanja Operasi	6.594.810.332,00	5.834.832.792,00	88,48
Belanja Pegawai	4.693.965.195,00	4.208.887.574,00	89,69
Belanja Barang dan Jasa	1.900.845.137,00	1.625.945.218,00	85,54
Total Belanja Daerah	1.703.162.034.813,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	0,39%	0,38%	

2.3.2.5 *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja ADD	82.907.279.820,00	82.907.279.820,00	100
Dana Perimbangan	1.011.461.144.000,00	973.346.791.563,00	96,23
DAK Fisik	62.885.287.000,00	42.965.052.289,00	68,32
DAK Non Fisik	227.349.635.000,00	209.212.342.030,00	92,02
Total Dana Perimbangan dikurangi DAK	721.226.222.000,00	721.169.397.244,00	99,99
Persentase	11,50%	11,50%	

2.3.2.6 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
Total	Belanja Pada	7.556.510.202,04	7.101.549.609,00	93,98
Inspektorat Daerah				
Belanja Operasi		7.339.510.202,04	6.909.200.609,00	94,14
Belanja Pegawai		5.749.895.069,04	5.460.317.372,00	94,96
Belanja Barang dan Jasa		1.589.615.133,00	1.448.883.237,00	91,15
Belanja Modal		217.000.000,00	192.349.000,00	88,64
Total Belanja Daerah		1.703.162.034.813,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase		0,44%	0,46%	

2.3.2.7 *Mandatory Spending* Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut :

Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
Total	Belanja Penciptaan Lapangan Kerja	3.665.000.000,00	3.446.642.657,00	94,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.275.089.000,00	1.205.391.889,00	94,5%
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	480.922.388,00	96,2%
Pengadaan Sarana dan Prasarana	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.000.000,00	260.814.021,00	81,5%
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	269.911.000,00	269.911.000,00	100,0%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	142.653.459,00	71,3%
Pemeliharaan Rutin Jalan		200.000.000,00	199.624.000,00	99,8%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		400.000.000,00	387.325.900,00	96,8%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		300.000.000,00	300.000.000,00	100,0%
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		200.000.000,00	200.000,00,00	100,0%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai seluruh kebutuhan belanjanya melalui PAD. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik provinsi maupun pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

3.1.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Dalam Rupiah

Uraian	APBD	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
Pendapatan	1.587.473.591.277,00	1.577.410.438.958,88	(10.063.152.318,12)	99,37
Belanja	1.703.162.034.813,04	1.548.907.880.948,46	(154.254.153.864,58)	90,94
Surplus/(Defisit)	(115.688.443.536,04)	28.502.558.010,42	144.191.001.546,46	(24,64)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	(856.790,18)	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	115.688.443.536,00	115.687.586.745,82	(856.790,18)	100,00
SILPA	0,04	144.190.144.756,24	144.190.144.756,24	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab V, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

3.1.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
I	Pendapatan	1.577.410,44	1.555.811,56	1.475.561,87	1.624.330,23	1.482.950,69
II	Belanja	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,92	1.480.600,62
	Surplus/Defisit	28.502,56	8.280,11	10.926,55	11.491,69	2.350,07
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	118.187,57	113.908,34	103.047,22	120.841,88	122.206,95
2	Pengeluaran	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87	3.730,87
	Pembiayaan Netto	115.687,59	109.908,34	102.981,78	114.461,00	118.476,08
	SILPA	144.190,14	144.194,73	113.908,34	102.969,31	120.826,15

3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2018 sampai 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
1	Pajak Daerah	167.957,91	85.667,48	66.506,52	108.373,67	91.995,24
2	Retribusi Daerah	10.215,72	9.207,86	9.350,56	13.046,35	13.199,32
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.321,19	10.759,41	11.968,12	11.633,18	10.750,65
4	Lain-lain PAD yang sah	113.838,20	147.057,00	131.409,49	99.959,84	84.416,81
Jumlah		301.332,84	252.691,75	219.234,68	233.013,03	200.362,02

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah serta kegiatan optimalisasi pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah dari tahun anggaran 2018 hingga 2022 secara umum mengalami fluktuasi pencapaian terutama disebabkan oleh pencapaian target masing-masing pajak daerah.

Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah.

Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro dan bunga deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, pendapatan Denda atas Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan dana kapitasi JKN.

Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.

3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya namun untuk tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
1	Belanja Operasi	1.199.158,17	1.210.433,00	1.175.320,21	1.290.833,50	1.155.238,91
2	Belanja Modal	139.308,07	143.668,86	81.578,99	152.232,67	144.906,76
3	Belanja Tak Terduga		2.119,88	19.630,35	0,00	2.562,22
4	Belanja Transfer	210.441,64	191.309,71	188.105,77	192.755,75	177.892,73
Jumlah		1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,93	1.480.600,62

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022.

Realisasi Belanja Modal fluktuatif setiap tahun, dimana tahun 2020 Belanja Modal dibatasi untuk pengadaan yang sangat mendesak dan untuk penanganan Covid-19 sehingga realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya karena anggaran diarahkan untuk penanganan Covid-19.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi Belanja Tidak Terduga biasanya tergantung dari Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2022 kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Karangasem.

Belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.

Untuk Tahun 2022 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan PMK. No 134/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun 2022 dari Dana Transfer Umum (DTU), di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk penanganan perlindungan sosial yaitu penciptaan lapangan kerja.

Untuk anggaran dan realisasi yang di pergunakan oleh OPD yang mana untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penciptaan lapangan kerja Tahun 2022 yaitu:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.275.089.000	1.205.391.889	94,5%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	480.922.388	96,2%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.000.000	260.814.021	81,5%
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	269.911.000	269.911.000	100,0%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000	142.653.459	71,3%
Pemeliharaan Rutin Jalan	200.000.000	199.624.000	99,8%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	387.325.900	96,8%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000	300.000.000	100,0%
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000	200.000.000	100,0%
Total	3.665.000.000,00	3.446.642.657,00	94%

3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
1	Penerimaan	118.187,57	113.908,34	103.047,22	120.841,88	122.206,95
2	Pengeluaran	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87	3.730,87

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini / dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.



3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

3.1.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{301.332.840.865,58}{1.548.907.880.948,46} \times 100\% = 19,45\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 19,45% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{301.332.840.865,58}{1.199.158.170.051,31} \times 100\% = 25,13\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 25,13%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

3.1.3.3 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja}} = \frac{457.183.753.993,58}{1.548.907.880.948,46} \times 100\% = 29,52\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 29,52%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

3.1.3.4 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{432.728.487.154,58}{1.199.158.170.051,31} \times 100\% = 36,09\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 36,09%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	
					Realisasi	Target
PAD	13,53	14,24	14,97	16,33	19,45	14,91
Belanja						
PAD	17,34	18,05	18,65	20,88	25,13	19,45
Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah PAD yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan.

Khusus Tahun 2022, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 14,91% untuk menopang belanja dan 19,45% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 19,45% dan 25,13%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2022 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame, MBLB dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2022 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja. Dalam masa pandemi tidak ada pengeluaran yang direalisasikan tanpa ada pagu anggarannya kecuali beberapa utang jangka pendek untuk kegiatan operasional kantor (seperti listrik, air, telepon), kegiatan operasional RSUD, serta utang belanja pegawai karena persentase pendapatan Tahun 2022.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2022. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab V.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

4. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
5. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
6. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2022.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada awal Tahun 2022 terjadi perubahan susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadi penggabungan beberapa unit kerja dan perangkat daerah di Kabupaten Karangasem yang ditetapkan Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 7 Unit Bagian), 17 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem baru bisa diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010. BLUD RSUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta RSUD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan RSUD yang memuat BLUD didalamnya.

4.1.4 Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 telah menggunakan basis akrual.

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kesinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
3. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
4. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
5. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
6. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya; dan
7. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
2. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran; dan
3. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga



pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
5. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Pendapatan - LRA

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum;
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



4.4.3 Beban - LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
3. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
4. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
5. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
6. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

4.4.4 Belanja - LRA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban serta dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja;
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain PAD yang Sah;
6. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
7. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.5 Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

2. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
3. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
4. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
5. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
6. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
7. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.6 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (*investasi*);
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.



4.4.7 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.7.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya;
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
8. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
9. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

10. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
11. Persediaan terdiri atas: barang pakai habis, barang tak pakai habis, barang bekas dipakai; dan
12. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

4.4.7.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
- b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya non permanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*); dan

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

6. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.4.7.3 Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
15. Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan;
19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan; dan
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

4.4.7.4 Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

4.4.7.5 Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;
5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya; dan
7. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

4.4.7.6 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
10. Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

4.4.7.7 Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

2. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

4.4.7.8 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih Rp0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2022, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010; Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

3. Pada Tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;
4. Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan Tahun 2022 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan 2022} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \text{penyusutan per periode} : 12$$

$$\text{Nilai penyusutan pada tahun berkenaan} = \text{penyusutan per bulan} \times \text{bulan kepemilikan aset tetap.}$$

5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2022 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
6. Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

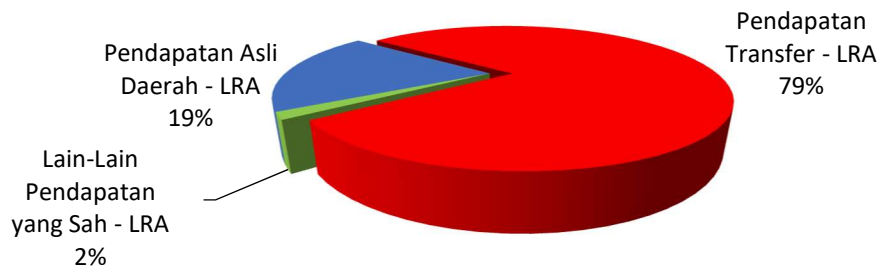
5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah - LRA	253.884.957.846,00	301.332.231.354,78	118,69	252.691.747.485,16
Pendapatan Transfer - LRA	1.305.565.130.932,00	1.251.259.824.797,00	95,84	1.218.932.970.246,13
Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	28.023.502.499,00	24.818.382.807,10	88,56	84.186.840.123,19
Jumlah	1.587.473.591.277,00	1.577.410.438.958,88	99,37	1.555.811.557.854,48

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LRA TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	141.910.162.195,00	167.957.909.825,42	118,36	85.667.480.089,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.412.126.000,00	10.215.719.116,00	98,11	9.207.856.781,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9.620.904.738,00	9.321.192.563,91	96,88	10.759.415.258,47
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	91.941.764.913,00	113.837.409.849,45	123,81	147.056.995.356,69
Jumlah	253.884.957.846,00	301.332.231.354,78	118,69	252.691.747.485,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel - LRA	13.600.000.000,00	23.092.040.966,00	169,79	1.174.092.427,00
Pajak Restoran - LRA	6.781.512.195,00	11.378.209.719,00	167,78	1.913.140.738,00
Pajak Hiburan - LRA	20.000.000,00	78.796.577,00	393,98	7.132.565,00
Pajak Reklame - LRA	483.000.000,00	526.388.100,00	108,98	494.230.700,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	14.900.000.000,00	15.635.109.437,00	104,93	13.555.934.891,00
Pajak Parkir - LRA	14.400.000,00	6.385.500,00	44,34	2.880.000,00
Pajak Air Tanah - LRA	660.000.000,00	918.841.699,00	139,22	622.734.492,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	87.500.000.000,00	96.437.421.080,67	110,21	51.903.906.750,00
PBB P2 - LRA	6.151.250.000,00	6.544.889.473,00	106,40	5.790.768.710,00
BPHTB - LRA	11.800.000.000,00	13.339.827.273,75	113,05	10.202.658.816,00
Jumlah	141.910.162.195,00	167.957.909.825,42	118,36	85.667.480.089,00

Penjelasan:

Dasar hukum yang mendasari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak *Online*;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 20 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 55 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

18. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2014 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian SPTPD Pajak Hotel dan Restoran;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 26 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan BPHTB secara *online*;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
23. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 434/HK/2022 tentang Penghapusan sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kepada Wajib Pajak;
24. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 457/HK/2022 tentang Penghapusan sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kepada Wajib Pajak;
25. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 547/HK/2022 tentang Penghapusan sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kepada Wajib Pajak; dan
26. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 793/HK/2022 tentang Penghapusan sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kepada Wajib Pajak.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah - LRA di TA 2022 secara umum dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian yang mulai pulih dan mulai Bergeraknya sektor pariwisata sehingga berdampak pada jenis pajak hotel, restoran, PPJ dan MBLB;
2. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah khususnya jenis pajak hotel dan restoran yang dilakukan pembayaran bertahap/ angsuran serta Pelaksanaan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan Negeri Karangasem dalam penyelesaian piutang pajak daerah;
3. Adanya kebijakan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administratif berupa denda mulai masa pajak bulan Maret 2020 s.d Desember 2022 sebagaimana Peraturan Bupati Karangasem No. 57 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah dalam Masa Penanganan Covid-19 dan Perbup 26 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda PBB-P2;
4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pemungutan pajak daerah meliputi *digitalisasi pajak MBLB, digitalisasi pajak hotel, restoran* serta transaksi *pembayaran non tunai* sebagaimana mendukung Permendagri No. 56 Tahun 2021 tentang TP2DD dan ETPD yaitu melaksanakan digitalisasi pajak daerah meliputi pelaporan online SPTPD, pembayaran online/kanal digital (QRIS, M Banking dsb), faktur barcode/digitalisasi pajak MBLB, validasi BPHTB;
5. Optimalisasi Monitoring Pajak MBLB dengan melibatkan stakeholder terkait dalam pengawasan pajak MBLB melalui pos pengawasan pajak MBLB;
6. Mengoptimalkan sosialisasi perpajakan daerah dan Pelayanan Perpajakan melalui pelayanan online pajak daerah serta pemberian reward kepada wajib pajak (QRIS PBB-P2) dalam pemungutan pajak daerah;
7. Mengoptimalkan validasi data wajib pajak daerah (khususnya PBB-P2, Pajak Hotel, Restoran) dengan melibatkan Perangkat Desa;
8. Mengoptimalkan pendaan potensi wajib daerah yang baru;
9. Pengembangan pelayanan pajak melalui pelayanan online WhatsApp dan jemput PBB-P2; dan
10. Pajak Parkir pada Tahun 2022 belum mampu mencapai target mengingat potensi yang sangat kecil dengan pailitnya penyumbang pajak parkir terbesar yaitu PT. Hardys dan usaha pengganti tidak melaksanakan pemungutan parkir karena sepi pengunjung demikian juga belum bersedianya pasar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

modern berjejaring untuk menjadi wajib pajak parkir karena tidak menyelenggarakan pemungutan parkir kepada konsumen tetapi parkir sebagai penunjang tambahan untuk meningkatkan kunjungan konsumen. Sedangkan WP parkir yang ada kebanyakan adalah parkir untuk sekolah-sekolah dimana pertengahan tahun 2022 baru mulai tatap muka.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum - LRA				
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.500.000.000,00	2.007.261.100,00	133,82	1.825.628.400,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	280.840.000,00	253.147.000,00	90,14	251.360.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	203.700.000,00	210.220.000,00	103,20	209.892.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.708.000.000,00	4.086.445.000,00	110,21	3.592.466.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	500.000.000,00	526.817.600,00	105,36	569.622.150,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	45.000.000,00	52.055.000,00	115,68	41.385.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	700.000.000,00	779.427.464,00	111,35	685.593.751,00
Retribusi Jasa Usaha - LRA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	219.926.000,00	223.826.100,00	101,77	220.696.000,00
Retribusi Terminal - LRA	124.680.000,00	127.209.000,00	102,03	124.974.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	209.300.000,00	249.935.000,00	119,41	229.953.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	30.000.000,00	31.080.500,00	103,60	30.328.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA	2.003.680.000,00	804.450.000,00	40,15	109.155.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	22.000.000,00	22.465.000,00	102,11	28.620.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu- LRA				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	600.000.000,00	667.025.352,00	111,17	814.253.580,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	50.000.000,00	61.500.000,00	123,00	58.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	5.000.000,00	3.355.000,00	67,10	4.307.500,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	210.000.000,00	109.500.000,00	52,14	411.122.400,00
Jumlah	10.412.126.000,00	10.215.719.116,00	98,11	9.207.856.781,00

Penjelasan:

Dasar hukum yang mendasari pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah - LRA di TA 2022 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
- b. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji;
- c. Realisasi Retribusi pelayanan pasar lebih tinggi dari target disebabkan pada Tahun 2022 sudah tidak diberlakukan lagi pembatasan sosial secara ketat, sehingga pasar beroperasi secara normal, namun target ditetapkan memperhitungkan kondisi saat pandemi Covid-19;
- d. Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena penggunaan jasa penyedotan kakus oleh masyarakat meningkat; dan
- e. Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan;
- b. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan adanya kegiatan pemotongan oleh kelompok masyarakat yang belum diprediksi sebelumnya;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan karena mulai pulihnya kunjungan wisatawan terutama tempat khusus parkir yang berada di objek-objek pariwisata; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

d. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan karena sektor pariwisata dalam tahapan pemulihan dan terjadinya cuaca ekstrim dikabupaten karangasem pada bulan oktober sangat mempengaruhi kepariwisataan utamanya rafting DTW tukad telaga waja sehingga mengakibatkan terbatasnya kunjungan wisatawan ke DTW yang dipungut retribusi.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

- Penerimaan Retribusi IMB diatas anggaran yang ditetapkan disebabkan karena sangat bergantung dari adanya permohonan IMB atau kegiatan investasi dan pembangunan oleh masyarakat serta Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG sudah ditetapkan tahun 2022 dengan Perda No 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga pemungutan retribusi sudah bisa dilaksanakan;
- Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
- Pendapatan Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena ada beberapa kendaraan pedesaan tidak beroperasi akibat dampak sepinya penumpang yang mengakibatkan penghasilannya menurun sehingga menunda untuk mengurus perpanjangan ijin trayek;
- Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan; dan
- Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 secara total lebih tinggi dari Tahun 2021 disebabkan kondisi perekonomian masyarakat semakin membaik.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2022 dan 2021 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	9.620.904.738,00	9.321.192.563,91	96,88	10.759.415.258,47

Penjelasan:

Rincian penerimaan atas Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT BPD Bali	8.915.028.124,00	8.902.529.172,68	99,86	10.190.350.393,18
PT Jamkrida Bali Mandara	0,00	12.498.951,00	-	13.345.072,00
Perumda Tirta Tohlangkir	705.876.614,00	406.164.440,23	57,54	555.719.793,29
Jumlah	9.620.904.738,00	9.321.192.563,91	96,88	10.759.415.258,47

Penerimaan deviden dari PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan hasil RUPS yang dijelaskan sesuai *point* 5.3.1.2.2.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	60.169.610,00	27.470.000,00	45,65	19.090.000,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.447.000.000,00	1.841.350.137,65	127,25	2.950.057.395,39
Pendapatan Bunga - LRA	3.208.333.400,00	3.572.916.666,83	111,36	1.400.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0,00	248.352.744,41	-	296.752.739,11
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	10.000.000,00	0,00	-	2.070.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	202.676.211,65	-	183.524.604,53
Pendapatan Denda Pajak - LRA	216.261.903,00	450.346.262,33	208,24	981.252.219,00
Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	12.049.776,00	-	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0,00	15.332.138,00	-	17.452.378,00
Pendapatan BLUD - LRA	87.000.000.000,00	107.465.715.912,58	123,52	119.229.486.434,66
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	0,00	0,00	-	21.965.409.586,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	0,00	0,00	-	11.900.000,00
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	1.200.000,00	-	0,00
Jumlah	91.941.764.913,00	113.837.409.849,45	123,81	147.056.995.356,69

Penjelasan:

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan utamanya disebabkan:

- Adanya penerimaan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Kesadaran Wajib Pajak meningkat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pajak untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, parkir, MBLB dan PBB-P2, kebijakan pemberian keringanan pajak daerah yaitu penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak daerah (Perbup Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda PBB-P2);
- Pendapatan BLUD yang lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan :
 - Tergantung jumlah pasien yang berobat di mana pada Tahun 2022;
 - Terjadinya peningkatan pendapatan mulai Bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 karena ada layanan baru seperti poli CAPD bagi pasien - pasien dengan penyakit gagal ginjal dan penambahan pelayanan cuci darah, masyarakat memanfaatkan untuk berobat di RSUD Karangasem, baik rawat inap maupun rawat jalan serta masih adanya pasien covid - 19; dan
 - Pada Bulan April 2022 terdapat pembayaran piutang atas klaim covid - 19 Tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp35.274.721.200,00 yang sangat mempengaruhi pelampauan pendapatan tahun 2022.
- Terbitnya PMDN Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyebabkan pada tahun 2022 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dianggarkan pada rekening Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LRA yang



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.098.828.749.000,00	1.060.714.386.563,00	96,53	1.097.820.639.495,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	206.736.381.932,00	190.545.438.234,00	92,17	121.112.330.751,13
Jumlah	1.305.565.130.932,00	1.251.259.824.797,00	95,84	1.218.932.970.246,13

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan - LRA	1.011.461.144.000,00	973.346.781.563,00	96,23	954.204.838.495,00
Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	9.523.895.000,00	9.523.895.000,00	100,00	58.326.553.000,00
Dana Desa - LRA	77.843.710.000,00	77.843.710.000,00	100,00	85.289.248.000,00
Jumlah	1.098.828.749.000,00	1.060.714.386.563,00	96,53	1.097.820.639.495,00

Penjelasan:

- Rincian Saldo Dana Perimbangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil - LRA	20.562.842.000,00	21.942.135.428,00	106,71	27.677.029.795,00
Dana Alokasi Umum - LRA	700.663.380.000,00	699.227.251.816,00	99,80	700.663.380.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	62.885.287.000,00	42.965.052.289,00	68,32	82.936.341.064,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	227.349.635.000,00	209.212.342.030,00	92,02	142.928.087.636,00
Jumlah	1.011.461.144.000,00	973.346.781.563,00	96,23	954.204.838.495,00

Penjelasan:

- Rincian Saldo Dana Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	4.939.844.000,00	6.178.876.725,00	125,08	7.827.337.887,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 - LRA	12.496.068.000,00	12.496.068.000,00	100,00	16.529.722.320,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	875.216.000,00	1.006.617.477,00	115,01	1.376.318.274,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LRA	293.354.000,00	302.213.226,00	103,02	269.151.164,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	49.000,00	49.000,00	100,00	0,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan - LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
Jumlah	20.562.842.000,00	21.942.135.428,00	106,71	27.677.029.795,00

- Saldo Dana Alokasi Umum - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, di



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

mana Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan sebesar Rp700.663.380.000,00. Namun sesuai dengan pelaporan penyaluran pada aplikasi SIMTRADA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Berita Acara Rekonsiliasi TKDD Nomor : 176/RekonTKDD/2022 tanggal 24 Maret 2023 antara Pemda Karangasem dan DJPK, realisasi penyaluran DAU sebesar Rp700.663.380.000,00 namun terdapat potongan sebesar Rp1.436.128.184,00 sehingga penyaluran DAU Net sebesar Rp699.277.251.816,00 sama dengan yang diterima di Rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem.

Laporan Realisasi Penggunaan DAU Tahun 2022 diperuntukkan kegiatan beberapa bidang antara lain:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Pendidikan			
Belanja Pegawai	263.978.076.040,00	254.031.160.313,00	96,23
2. Kesehatan			
Belanja Pegawai	64.313.171.235,00	60.615.034.809,00	94,25
Belanja Barang dan Jasa	31.201.694.158,00	31.201.694.158,00	100
3. Pemberdayaan Ekonomi			
Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	934.657.730,00	89,02
Belanja Lainnya	6.000.000.000,00	5.880.000.000,00	98,00
4. Bidang Lainnya			
a. Penunjang Urusan Pemerintah			
Belanja Pegawai	99.998.843.578,00	91.624.706.019,00	91,63
Belanja Lainnya	80.576.288.700,00	80.576.288.700,00	100
b. Penunjang Urusan Pemerintah			
Belanja Pegawai	87.219.434.101,00	72.560.960.847,00	83,19
Belanja Barang dan Jasa	12.635.859.998,00	9.099.388.700,00	72,01
Belanja Modal	17.516.478.726,00	13.387.950.000,00	76,43
Belanja Lainnya	36.173.533.464,00	32.050.000.000,00	88,60

- c. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Bidang Pendidikan - LRA	11.638.207.000,00	9.448.556.511,00	81,19	11.644.230.993,00
DAK Bidang Pendidikan SKB - LRA	0,00	-	-	0,00
DAK Bidang Pendidikan PAUD - LRA	331.426.000,00	329.937.066,00	99,55	0,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - LRA	14.008.910.000,00	8.042.745.228,00	57,41	20.894.053.039,00
DAK Bidang Pertanian - LRA	1.672.147.000,00	1.442.538.984,00	86,27	461.858.002,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	721.057.000,00	450.319.500,00	62,45	0,00
DAK Bidang Pariwisata - LRA	3.249.992.000,00	0,00	-	2.769.411.960,00
DAK Bidang Jalan - LRA	21.400.704.000,00	14.199.633.000,00	66,35	35.341.717.000,00
DAK Bidang Air Minum - LRA	4.491.168.000,00	4.470.166.000,00	99,53	6.893.040.970,00
DAK Bidang Sanitasi - LRA	2.600.000.000,00	2.586.000.000,00	99,46	0,00
DAK Bidang Irigasi - LRA	1.764.676.000,00	1.093.412.000,00	61,96	4.932.029.100,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LRA	1.007.000.000,00	901.744.000,00	89,55	0,00
Jumlah	62.885.287.000,00	42.965.052.289,00	68,32	82.936.341.064,00

- d. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Non-Fisik - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BOS Reguler - LRA	76.475.100.000,00	71.135.532.396,00	93,02	0,00
Tunjangan Profesi Guru - LRA	124.716.858.000,00	118.710.746.440,00	95,18	131.344.366.000,00
Tambahan Penghasilan Guru - LRA	3.657.000.000,00	1.460.250.000,00	39,93	1.563.500.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	3.673.540.000,00	3.574.959.000,00	97,32	3.245.977.879,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	1.312.800.000,00	1.213.183.000,00	92,41	1.638.332.916,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - LRA	9.741.922.000,00	6.729.732.104,00	69,08	2.825.451.751,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	431.200.000,00	390.486.250,00	90,56	262.730.570,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	0,00	0,00	-	1.240.371.470,00
Dana Pelayanan Kepariwisata - LRA	1.261.090.000,00	1.054.439.540,00	83,61	807.357.050,00
Fasilitasi Penanaman Modal - LRA	383.914.000,00	218.900.850,00	57,02	0,00
BOKB - LRA	4.487.611.000,00	3.766.212.850,00	83,92	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LRA	451.800.000,00	225.900.000,00	50,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian - LRA	756.800.000,00	731.999.600,00	96,72	0,00
Jumlah	227.349.635.000,00	209.212.342.030,00	92,02	142.928.087.636,00

Penerimaan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA terdapat pengembalian ke kas negara sebesar Rp9.940.000,00 yang dilakukan oleh Lembaga KB Manik Kumara karena penonaktifan lembaga tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 31/ KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang pengakuannya mengurangi pendapatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD-LRA.

- Dana Insentif Daerah (DID) - LRA yang diterima pada TA 2022 sebesar Rp9.523.895.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.

Laporan Realisasi Penggunaan DID Tahun 2022 diperuntukkan kegiatan beberapa bidang antara lain:

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
1. Bidang Pendidikan		
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar	600.000.000,00	4 ruang kelas
2. Bidang Kesehatan		
Pengelolaan iuran jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu (peserta PBP dan BP Kelas 3)	7.168.895.000,00	15804 orang
3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pemeliharaan bangunan 2 Pasar Hewan dan 2 Pasar Rakyat)	163.484.307,00	4 pasar
Total	7.932.379.307,00	

- Dana Desa - LRA yang diterima pada TA 2022 sebesar Rp77.843.710.000,00, sama dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Antar Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA	132.352.597.873,00	131.395.646.289,00	99,28	88.024.000.926,13
Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA	74.383.784.059,00	59.149.791.945,00	79,52	33.088.329.825,00
Jumlah	206.736.381.932,00	190.545.438.234,00	92,17	121.112.330.751,13

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	53.268.339.221,00	50.055.537.787,00	93,97	38.770.337.101,70
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	23.642.031.191,00	21.531.480.691,00	91,07	12.150.004.486,12
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	31.613.181.021,00	27.907.595.382,00	88,28	20.652.308.200,48
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	195.869.986,00	171.248.258,00	87,43	141.592.694,22
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	23.633.176.454,00	31.729.784.171,00	134,26	16.309.758.443,61
Jumlah	132.352.597.873,00	131.395.646.289,00	99,28	88.024.000.926,13

2. Rincian Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali - LRA	30.906.840.000,00	0,00	-	33.088.329.825,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LRA	43.401.944.059,00	59.149.791.945,00	136,28	0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota - LRA	75.000.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah	74.383.784.059,00	59.149.791.945,00	79,52	33.088.329.825,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	398.546.349,10	-	2.673.116.227,38
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	28.023.502.499,00	24.419.836.458,00	87,14	81.513.723.895,81
Jumlah	28.023.502.499,00	24.818.382.807,10	88,56	84.186.840.123,19

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LRA	0,00	387.000.000,00	-	2.673.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	0,00	11.546.349,10	-	116.227,38
Jumlah	0,00	398.546.349,10	-	2.673.116.227,38

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp387.000.000,00 berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2022 Nomor PHD-98/MK.7/DTK.03/AMK/2022 Tanggal 10 Juni 2022; dan
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 menerima sumbangan dari masyarakat secara tunai sebesar Rp394.626,10 dan kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari PT Protelindo dan PT Dayamitra sebesar Rp11.151.723,00 yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA TA 2022 dan 2021 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	0,00	0,00	-	73.630.363.100,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah – LRA	0,00	3.106.064,00	-	7.883.360.795,81
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.023.502.499,00	24.416.730.394,00	87,13	
Jumlah	28.023.502.499,00	24.419.836.458,00	87,14	81.513.723.895,81

Penjelasan:

1. Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di TA 2022 merupakan pengembalian atas hibah yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak ketiga yaitu Dana Hibah ke Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp3.106.064,00;
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2022 dibawah dari yang dianggarkan disebabkan dilakukan pemotongan penyaluran sebesar SILPA tahun 2021 kepada puskesmas; dan
3. Terbitnya PMDN Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyebabkan pada tahun 2022 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dianggarkan pada rekening Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.305.343.525.500,04	1.199.158.170.051,31	91,87	1.210.433.001.300,69
Belanja Modal	183.107.974.999,00	139.308.067.685,15	76,08	143.668.862.436,15
Belanja Tak Terduga	4.123.533.464,00	0,00	0,00	2.119.880.311,00
Jumlah	1.492.575.033.963,04	1.338.466.237.736,46	89,67	1.356.221.744.047,84

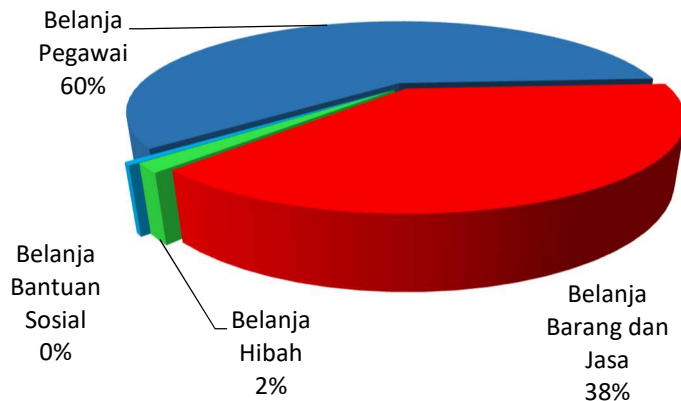
5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	777.329.458.273,04	721.933.660.292,55	92,87	744.032.552.582,16
Belanja Barang dan Jasa	502.653.240.978,00	452.812.860.996,76	90,08	442.983.592.013,70
Belanja Hibah	18.886.426.249,00	18.364.668.762,00	97,24	18.086.736.704,83
Belanja Bantuan Sosial	6.474.400.000,00	6.046.980.000,00	93,40	5.330.120.000,00
Jumlah	1.305.343.525.500,04	1.199.158.170.051,31	91,87	1.210.433.001.300,69

Penjelasan:

- Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



- Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 1*.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	448.053.802.397,04	424.543.362.611,80	94,75	426.075.954.929,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.252.902.391,00	81.870.044.396,00	90,71	103.157.887.185,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	173.977.037.527,00	140.096.055.374,78	80,53	152.393.858.547,23
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.322.336.340,00	31.306.310.635,00	99,95	28.492.705.759,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.360.179.618,00	834.999.746,97	61,39	571.114.871,93



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	849.600.000,00	848.350.000,00	99,85	787.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	31.513.600.000,00	42.434.537.528,00	134,65	32.554.031.290,00
Jumlah	777.329.458.273,04	721.933.660.292,55	92,87	744.032.552.582,16

Penjelasan:

1. Terjadi pelampauan pada belanja pegawai BLUD disebabkan terjadinya pembayaran jasa pelayanan akibat peningkatan pendapatan BLUD RSUD yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 579 Tahun 2022 tentang Persetujuan Belanja Melampaui Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 dan Surat Bupati Karangasem Nomor : 900/2858/EkBang/Sekda/2022 Perihal : Persetujuan Pelampauan Ambang Batas Anggaran Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022; dan
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 2*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	79.204.599.792,00	67.944.059.923,50	85,78	60.183.032.379,00
Belanja Jasa	231.812.138.507,00	206.737.239.492,00	89,18	222.204.909.475,50
Belanja Pemeliharaan	24.780.568.507,00	20.960.763.293,38	84,59	25.192.135.255,74
Belana Perjalanan Dinas	23.656.913.470,00	20.259.111.009,00	85,64	13.631.699.775,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.850.403.409,00	16.779.418.825,00	80,48	9.807.170.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	59.356.421.210,00	56.203.638.090,16	94,69	53.570.145.927,46
Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.992.196.083,00	63.928.630.363,72	101,49	58.394.499.201,00
Jumlah	502.653.240.978,00	452.812.860.996,76	90,08	442.983.592.013,70

Penjelasan:

1. Terjadi pelampauan pada belanja barang dan jasa BLUD disebabkan terjadinya peningkatan kunjungan pasien di RSUD Karangasem yang tidak diikuti dengan kecukupan anggaran belanja yang mengakibatkan RSUD menggunakan fleksibilitas sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 579 Tahun 2022 tentang Persetujuan Belanja Melampaui Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022; dan
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 3*.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	249.983.214,00	99,99	2.191.833.260,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.833.633.401,00	17.311.892.700,00	97,07	15.092.110.596,83
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	802.792.848,00	802.792.848,00	100,00	802.792.848,00
Jumlah	18.886.426.249,00	18.364.668.762,00	97,24	18.086.736.704,83

Penjelasan:

- Hibah Kepada Pemerintah Pusat yaitu bantuan Hibah kepada Lembaga Organisasi Kepramukaan TA 2022 sebesar Rp249.983.214,00;
- Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Tahun 2022 terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.428.899.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.126.283.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.756.710.700,00
Jumlah	17.311.892.700,00

- Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 209/HK/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Karangasem TA 2022 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Total Nilai Bantuan
Partai Hati Nurani Rakyat	55.748.862,00
Partai Golongan Karya	166.631.868,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	219.174.384,00
Partai Demokrat	57.696.912,00
Partai Keadilan Sejahtera	18.311.670,00
Partai Nasional Demokrat	156.392.340,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	93.650.700,00
Partai Persatuan Indonesia	35.186.112,00
Jumlah	802.792.848,00

- Rincian belanja hibah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 4.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	474.400.000,00	166.980.000,00	35,20	50.120.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	6.000.000.000,00	5.880.000.000,00	98,00	5.280.000.000,00
Jumlah	6.474.400.000,00	6.046.980.000,00	93,40	5.330.120.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Penjelasan:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa bantuan bedah rumah sebanyak 196 rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp30.000.000,00 dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	55.641.973.120,00	47.219.074.193,50	84,86	48.585.490.957,63
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	39.950.260.866,00	32.102.107.210,05	80,36	15.612.356.116,52
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.781.854.881,00	59.535.424.292,60	68,60	75.187.840.992,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	733.886.132,00	451.461.989,00	61,52	4.283.174.370,00
Jumlah	183.107.974.999,00	139.308.067.685,15	76,08	143.668.862.436,15

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 5*.

5.1.2.2.1 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	49.459.295,00	41.522.000,00	83,95	296.555.050,00
Belanja Modal Alat Angkutan	4.101.997.000,00	3.828.473.150,00	93,33	1.921.992.318,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.273.152.000,00	14.500.000,00	1,14	656.466.298,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.458.378.200,00	4.899.706.488,00	89,76	17.175.054.651,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	863.700.000,00	809.467.900,00	93,72	1.095.253.320,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.753.753.673,00	13.170.260.904,00	70,23	14.550.757.921,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.194.515.000,00	3.071.359.000,00	96,14	618.582.000,00
Belanja Modal Komputer	21.647.017.952,00	21.090.933.174,00	97,43	11.640.911.599,63
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	-	260.000.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	-	79.111.500,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	300.000.000,00	292.851.577,50	97,62	206.263.600,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	-	84.542.700,00
Jumlah	55.641.973.120,00	47.219.074.193,50	84,86	48.585.490.957,63



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 6*.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	37.091.036.205,00	29.254.959.162,05	78,87	14.485.759.090,17
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.859.224.661,00	2.847.148.048,00	99,58	1.126.597.026,35
Jumlah	39.950.260.866,00	32.102.107.210,05	80,36	15.612.356.116,52

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 7*.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	82.138.884.001,00	55.838.342.500,00	67,98	59.198.917.612,00
Belanja Modal Bangunan Air	2.734.382.480,00	2.059.440.250,00	75,32	14.677.567.780,00
Belanja Modal Instalasi	788.000.000,00	745.900.000,00	94,66	858.332.000,00
Belanja Modal Jaringan	1.120.588.400,00	891.741.542,60	79,58	453.023.600,00
Jumlah	86.781.854.881,00	59.535.424.292,60	68,60	75.187.840.992,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 8*.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	646.886.132,00	367.085.989,00	56,75	445.552.870,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	28.000.000,00	25.376.000,00	90,63	112.096.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	-	3.583.822.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	141.703.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	733.886.132,00	451.461.989,00	61,52	4.283.174.370,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran* 9.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Aset Lainnya TA 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	4.123.533.464,00	0,00	-	2.119.880.311,00

Penjelasan:

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2022 dan TA 2021. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2022 sebesar Rp0,00 disebabkan tidak terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2022.

5.1.2.4 Transfer Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA	21.011.011.030,00	20.875.653.392,00	99,36	12.055.086.912,23
Transfer Bantuan Keuangan - LRA	189.575.989.820,00	189.565.989.820,00	99,99	179.254.619.838,35
Jumlah	210.587.000.850,00	210.441.643.212,00	99,93	191.309.706.750,58

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa - LRA	19.563.129.403,00	19.563.129.403,00	100,00	10.816.925.541,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - LRA	1.447.881.627,00	1.312.523.989,00	90,65	1.238.161.371,23
Jumlah	21.011.011.030,00	20.875.653.392,00	99,36	12.055.086.912,23

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa TA 2022. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintahan Desa disalurkan kepada 75 desa. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dilihat pada *lampiran 10 dan 11*.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan - LRA TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	160.750.989.820,00	160.750.989.820,00	100	157.187.522.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	28.825.000.000,00	28.815.000.000,00	99,97	22.067.097.338,35
Jumlah	189.575.989.820,00	189.565.989.820,00	99,99	179.254.619.838,35

Penjelasan:

- Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan - LRA didasarkan pada:
 - Transfer Dana Desa Setiap Desa TA 2022 langsung ditransfer dari Kas Negara ke Rekening Kas Desa;
 - Perbup Karangasem Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa TA 2022;
 - Keputusan Bupati Karangasem Nomor 678/Hk/2022 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Penyaluran Sisa Kurang Bayar Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Karangasem;
 - Keputusan Bupati Karangasem Nomor 387/Hk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa Adat dan Banjar Adat di wilayah Kelurahan se-Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022; dan
 - Keputusan Bupati Karangasem Nomor 388/Hk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022.
- Rincian desa penerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus serta Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada *lampiran 12 s.d. 16*.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2021 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	100,00	113.908.336.480,88
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Jumlah	115.688.443.536,00	115.687.586.745,82	100,00	109.908.336.480,88

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	100,00	113.908.336.480,88
Jumlah	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	100,00	113.908.336.480,88

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2022 dan 2021 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	11.442.849.593,00	11.442.849.593,94	100,00	6.114.518.447,88
Pelampauan Penerimaan Lain-lain	5.921.786.628,00	5.921.786.628,00	100,00	0,00
Pendapatan Daerah yang Sah				
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	100.823.807.315,00	100.823.807.315,00	100,00	107.793.818.033,00
Koreksi SiLPA	0,00	(856.791,12)	-	0,00
Jumlah	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	100,00	113.908.336.480,88

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	0,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
➢ PT. BPD Bali	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	750.000.000,00
➢ PT. Jamkrida Bali Mandara	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
➢ Perumda Tirta Tohlangkir	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	0,00

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2022 dan 2021 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ Pendapatan Daerah - LRA				
✓ Pendapatan Asli Daerah - LRA	253.884.957.846,00	301.332.231.354,78	118,69	252.691.747.485,16
✓ Pendapatan Transfer - LRA	1.305.565.130.932,00	1.251.259.824.797,00	95,84	1.218.932.970.246,13
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	28.023.502.499,00	24.818.382.807,10	88,56	84.186.840.123,19
➢ Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	1.305.343.525.500,04	1.199.158.170.051,31	91,86	1.210.433.001.300,69
✓ Belanja Modal	183.107.974.999,00	139.308.067.685,15	76,08	143.668.862.436,15
✓ Belanja Tak Terduga	4.123.533.464,00	0,00	-	2.119.880.311,00
➢ Transfer Daerah				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	21.011.011.030,00	20.875.653.392,00	99,36	12.055.086.912,23
✓ Transfer Bantuan Keuangan	189.575.989.820,00	189.565.989.820,00	99,99	179.254.619.838,35
➢ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	118.188.443.536,00	118.187.586.745,82	100,00	113.908.336.480,88
✓ Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Jumlah	(0,04)	144.190.144.756,24	-	118.188.443.536,94

Penjelasan:

- Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 memiliki SiLPA sebesar Rp144.190.144.756,24 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➢ Dana SiLPA Terikat	47.836.090.417,73
✓ Kas di BLUD	17.714.268.768,19
✓ Kas Dana BOS	400.590.833,83
✓ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81
✓ Setara Kas	0,00
✓ DID Reguler	1.595.304.193,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
✓ DAK Fisik yang terdiri dari:	
• DAK Bidang Pendidikan SD	7.801,00
• DAK Bidang Pendidikan SMP	650.000,00
• DAK Bidang Pendidikan Perpustakaan	15.458.132,00
• DAK Bidang Farmasi	2.686,00
• DAK Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	1,00
• DAK Bidang Keluarga Berencana	2.203.050,00
• DAK Bidang Sanitasi	31.050,00
• DAK Air Minum	882.450,00
✓ DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
• Dana Tunjangan Profesi Guru	1.951.658.700,00
• Dana Tunjangan Penghasilan Guru	711.750.000,00
• Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5.182.746.190,00
• Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.890.861.287,00
• Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	9.534.900,00
• Dana Pelayanan Kepariwisata	379.958.584,00
• Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	104.351.000,00
• Dana Fasilitas Penanaman Modal	78.752.000,00
• Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	172.301.000,00
✓ BKK Propinsi Bali	
• BKK Penduduk Pendetang	75.375.725,00
• BKK PKK	70.726.650,00
• Subak dan Subak Abian	1.275.500
• Bantuan Keuangan untuk Rekonstruksi Ruas Jalan Purwayu-Telaga Mas	1.113.571.200,00
• Bantuan Keuangan untuk Rekonstruksi Ruas Jalan Pert. Batu Belah –Batu Belah	54.000,00
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	5.694.276.161,90
✓ Utang Belanja Jasa Tahun 2022	3.915.692.388,00
✓ Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah	3.385.207.192,00
✓ Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah	109.824.743,00
✓ Rekonstruksi jalan ruas jalan Muntig-Sukaluwih	1.294.411.300,00
> Dana SiLPA Non-Terikat	96.354.054.338,51
✓ Pelampauan PAD	47.447.883.019,58
✓ Efisiensi Belanja Hibah	521.757.487,00
✓ Efisiensi Belanja Bantuan Sosial	427.420.000,00
✓ Efisiensi Belanja Transfer	145.357.638,00
✓ Efisiensi Belanja Tak Terduga	4.123.533.464,00
✓ Lain-Lain	43.688.102.729,93
Jumlah	144.190.144.756,24

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	17.714.268.768,19
Kas Dana BOS	400.590.833,83
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81
Setara Kas	0,00
Jumlah	144.190.144.756,24



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.8* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.3* dan *Poin 5.2.5*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Karangasem (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	79.947.618.428,19	96.186.075.081,08
Kas di Bendahara Penerimaan	138.005.806,00	151.425.337,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	31.327.854.583,33	5.223.145.957,67
Kas Dana BOS	2.525.986.369,11	4.327.431.952,82
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.248.978.350,31	8.020.258.152,31
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	118.188.443.536,94	113.908.336.480,88

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2021 dan 2020 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(118.187.586.745,82)	(113.908.336.480,88)

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 dan 2020 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2022 dan 2021. Untuk saldo SiLPA TA 2021, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2021 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point* 5.6.4 di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 dan 2021 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2021 dan 2022. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 5.1.5. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.5 di bawah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas BOS SD dan SMP Tahun 2021	(856.791,12)	0,00
Jumlah	(856.791,12)	0,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33
Kas Dana BOS	400.590.833,83	2.525.986.369,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94

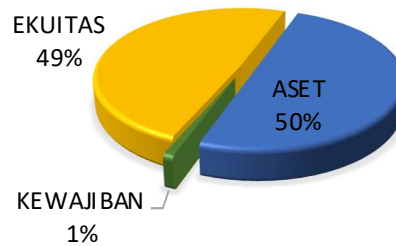
Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 5.1.5. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.3 di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk per tanggal 31 Desember 2022 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	255.766.386.631,46	255.744.596.514,74	21.790.116,72	0,01
Investasi Jangka Panjang	122.970.265.940,13	120.965.044.784,79	2.005.221.155,34	1,66
Aset Tetap	1.173.203.557.870,85	1.164.827.026.822,54	8.376.531.048,31	0,72
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
Aset Lainnya	50.473.265.715,18	47.736.520.373,05	2.736.745.342,13	5,73
Jumlah	1.602.413.476.157,62	1.589.273.188.495,12	13.140.287.662,50	0,83

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	144.190.144.756,24	118.531.866.405,30	25.658.278.350,94	21,65
Piutang	132.325.238.427,44	151.393.533.659,83	(19.068.295.232,39)	(12,60)
Penyisihan Piutang	(46.760.339.027,26)	(42.777.266.571,10)	(3.983.072.456,16)	9,31
Beban di Bayar Dimuka	241.577.372,88	211.051.952,07	30.525.420,81	14,46
Persediaan	25.769.765.102,16	28.385.411.068,64	(2.615.645.966,48)	(9,21)
Jumlah	255.766.386.631,46	255.744.596.514,74	21.790.116,72	0,83

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19	44.160.000.794,22	55,24
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00	(134.702.806,00)	(97,61)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33	(13.613.585.815,14)	(43,46)
Kas Dana BOS	400.590.833,83	2.525.986.369,11	(2.125.395.535,28)	(84,14)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31	(2.284.615.418,50)	(53,77)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	343.422.868,36	(343.422.868,36)	(100)
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	144.190.144.756,24	118.531.866.405,30	25.658.278.350,94	21,65

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada BPD Bali Cabang Amlapura dengan nomor rekening yaitu 022.01.00.00000-0. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Amlapura yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada *Poin 5.3.5* di atas;
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.303.000,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2022 dan disetorkan di awal Tahun 2023. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang I	167.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang II	639.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Karangasem I	45.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis I	248.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis II	50.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu I	334.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu II	350.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Sidemen	90.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Bebandem	173.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Rendang	68.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Selat	712.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan RS Pratama	427.000,00
Jumlah	3.303.000,00

3. Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022;
4. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2022, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2022
Saldo pada rekening nomor 022.01.0000473-1 di BPD Bali Cabang Amlapura	17.583.040.443,37
Saldo pada rekening nomor 145.00.7555777-3 di Bank Mandiri Cabang Amlapura	126.473.054,82
Saldo kas tunai di petugas kasir	4.755.270,00
Jumlah	17.714.268.768,19

Laporan keuangan Tahun Buku 2022 RSUD Kabupaten Karangasem telah diaudit oleh Auditor Independen KAP I Wayan Ramantha No.00038/2.0526/AU.2/11/0595-4/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan opini Wajar.

5. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp400.590.833,83 yang tersebar pada 400 sekolah negeri di seluruh Kabupaten Karangasem baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Saldo Kas Dana BOS pada SMPN 1 Manggis sebesar Rp63.853.690,00 di dalamnya terdapat uang pengembalian atas permasalahan sebagaimana LHA Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek No. 551/G3/LHA/Itjen-Insp II/XII/2022 tanggal 22 Desember sebesar Rp58.845.614,00 yang terdiri atas:

- Honorarium nasarumber wokshop yang tidak diperkenankan karena diberikan kepada Guru sebesar Rp595.000,00;
- Ketektoran kas sekolah berdasarkan Stock Opname sebesar Rp51.290.614,00; dan
- Pembayaran atas belanja konsumsi kegiatan yang dilaksanakan TA 2021 sebesar Rp6.960.000,00.

Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada *lampiran 17*;

- Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.964.362.931,81. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *lampiran 18*;
- Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) per 31 Desember 2022. Adapun saldo awal berupa saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) TA 2021 sebesar Rp343.422.868,36 telah dilunasi di TA 2022.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- Utang PFK di Bendahara Dana BOS atas PFK yang dipungut Tahun 2021 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp302.580.862,00;
- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kelebihan penerimaan pendapatan di BLUD RSUD Karangasem atas Klaim Covid-19 sebesar Rp36.000.000,00;
- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa tagihan samsat kendaraan yang belum dibayarkan kepada pemilik dana di Bendahara Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp496.500,00;
- Utang Jangka Pendek Lainnya di Bendahara JKN FKTP sebesar Rp166.320,00; dan
- Utang Jangka Pendek Lainnya di berupa kelebihan penyetoran kas tunai ke rekening dana BOS dari Bendahara BOS sebesar Rp4.179.186,36.

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) dapat dilihat pada *lampiran 19*.

5.3.1.1.2 Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Daerah	89.054.021.850,45	82.102.060.916,12	6.951.960.934,33	8,47
Piutang Retribusi Daerah	250.354.541,00	204.728.837,00	45.625.704,00	22,29
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.570.584.105,99	48.430.008.191,71	(29.859.424.085,72)	(61,65)
Piutang Transfer Antar Daerah	24.347.665.130,00	20.554.122.915,00	3.793.542.215,00	18,46
Piutang Lainnya	102.612.800,00	102.612.800,00	0,00	0,00
Jumlah	132.325.238.427,44	151.393.533.659,83	(19.068.295.232,39)	(12,60)

Penjelasan:

- Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	1.686.381.355,12	3.010.412.765,12	(1.324.031.410,00)	(43,98)
Piutang Pajak Restoran	893.426.306,00	1.687.200.396,00	(793.774.090,00)	(47,05)
Piutang Pajak Hiburan	185.508.596,66	199.310.492,66	(13.801.896,00)	(6,92)
Piutang Pajak Reklame	85.413.461,00	87.884.261,00	(2.470.800,00)	(2,81)
Piutang Pajak Parkir	0,00	48.000,00	(48.000)	(100,00)
Piutang Pajak Air Tanah	213.099.497,67	299.299.255,67	(86.199.758,00)	(28,80)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.912.467.033,00	25.370.361.063,67	6.542.105.969,33	25,79
Piutang PBB-P2	54.077.725.601,00	51.447.544.682,00	2.630.180.919,00	5,11
Jumlah	89.054.021.850,45	82.102.060.916,12	6.951.960.934,33	8,47

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2022 dan 2021 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.

Diantara saldo piutang pajak tersebut terdapat saldo piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama Gianyar pada Tahun 2014. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Karangasem NO. 26 Tahun 2022 maka pada bulan November 2022 telah dilaksanakan pemungutan PBB-P2 dengan sistem jemput bola/mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari perkotaan dan BumDes ataupun LPD nya belum bekerja sama dengan PT. BPD Bali Cabang Karangasem.

Kegiatan validasi piutang PBB-P2 melalui konfirmasi fisik kepada WP dilakukan secara bertahap pada Tahun 2022 sehingga dapat menunjukkan nilai piutang yang valid. Namun hasil pengolahan *database* SIM PBB Kabupaten Karangasem dapat memberikan informasi jumlah NOP dan SPPT serta nilai piutang pajak yang dapat diindikasikan belum valid dan memerlukan konfirmasi kepada WP dikarenakan WP tersebut belum melakukan pembayaran sejak piutang PBB-P2 diserahkan kepada Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal Neraca. Adapun penyajian validitas berdasarkan hasil pengolahan *database* SIM PBB-P2 sampai dengan tanggal Neraca diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat 2 kecamatan yang sudah tuntas dilaksanakan validasi piutang pajak PBB-P2 tahun 2022 yaitu Kecamatan Rendang dan Kecamatan Bebandem dapat diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan	NOP	SPPT (Lembar)	Piutang Pajak	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah Piutang Valid	Jumlah Piutang tidak valid
Rendang	118 NOP	2.832	33.661.935,00	56 NOP	62 NOP	17.177.681	16.484.254
Bebandem	91 NOP	2.184	58.797.257,00	44 NOP	47 NOP	35.053.129	23.744.128

Atas jumlah piutang yang tidak valid disebabkan tidak ditemukannya Objek dan Wajib Pajaknya. Belum dilakukan perlakuan penghapusan atas piutang yang tidak valid pada tahun 2022.

- b. Terdapat 3 kecamatan yang masih proses validasi pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu. Pada tanggal neraca proses yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak	Progress Validasi	%
Abang	425 NOP	10.200 Lembar SPPT	191.372.056,00	64 NOP	15%
Kubu	249 NOP	5.976 Lembar SPPT	111.223.737,00	57 NOP	23%
Selat	751 NOP	18.024 Lembar SPPT	254.572.112,00	489 NOP	65%

Proses validasi dilanjutkan prosesnya pada tahun 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- c. Terdapat 2 kecamatan yang belum dilakukan proses validasi tahun 2022 yaitu kecamatan Karangasem dan Kecamatan Sidemen. Proses validasi akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut :

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak
Sidemen	1.094 NOP	26.256 Lembar SPPT	286.054.093,00
Karangasem	1.463 NOP	35.112 Lembar SPPT	1.628.073.637,00

- d. Diawal tahun 2022 terdapat 167.472 SPPT pada 105.309 NOP dengan nilai Rp677.152.907,00 yang merupakan SPPT yang diterbitkan sebelum Tahun 1998 (di luar dari PBB-P2 yang diserahkan dalam berita acara dengan KPP Pratama Gianyar) terjadi pembayaran sebesar Rp1.543.008,00 (pokok piutang pajak) dan Rp500.437,00 (denda piutang pajak) sampai periode bulan Juni 2022, proses penghapusan pada aplikasi SIM PBB dilakukan pada bulan Juli 2022;

- e. BPKAD Kabupaten Karangasem akan berusaha melakukan validasi dan memproses lebih lanjut hasil validasi dari NOP yang belum melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang secara bertahap, sehingga saldo piutang PBB-P2 lebih valid dan dapat diyakini oleh para *stakeholder*.

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	242.911.041,00	204.728.837,00	38.182.204,00	18,65
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.443.500,00	0,00	7.443.500,00	-
Jumlah	250.354.541,00	204.728.837,00	45.625.704,00	22,29

4. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Kenaikan)/Penurunan	%
Piutang Denda Pajak Daerah	5.687.690.566,19	3.510.354.352,71	2.177.336.213,48	62,03
Piutang Denda Retribusi Daerah	2.527.255,00	14.577.031,00	(12.049.776,00)	(82,66)
Piutang BLUD	12.879.756.774,00	44.905.076.808,00	(32.025.320.034,00)	(71,32)
Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	609.510,80		609.510,80	100
Jumlah	18.570.584.105,99	48.430.008.191,71	(29.859.424.085,72)	(61,65)

Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Piutang Lain - Lain PAD yang sah untuk remunerisasi *Treasury Deposit Facility* Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor : S-233/WPB-22/2023 Perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2023, serta surat Nomor : S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Penyesuaian Kebijakan Akunransi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas TDF, atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia.

5. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.978.159.317,00	9.718.328.176,00	2.259.831.141,00	23,25
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.819.912.450,00	2.895.242.234,00	2.924.670.216,00	101,02



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	6.514.260.049,00	4.358.564.355,00	2.155.695.694,00	49,46
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Pajak	35.333.314,00	28.072.652,00	7.260.662,00	25,86
Pemanfaatan Air Permukaan				
Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	3.553.915.498,00	(3.553.915.498,00)	0,00
Rokok				
Jumlah	24.347.665.130,00	20.554.122.915,00	3.793.542.215,00	18,46

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/0805/PADFE/BPKAD perihal Perubahan atas Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali tanggal 17 Februari 2022, Keputusan Gubernur Bali Nomor: 411/04-E/HK/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Se-Bali Periode Desember TA 2021 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022, Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/7125/PADFE/BPKAD perihal Pagu Difinitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Nopember 2022 serta Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/389/PADFE/BPKAD perihal Perubahan atas Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali TA 2022 tanggal 18 Januari 2023.

6. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	102.612.800,00	102.612.800,00	0,00	0,00
Jumlah	102.612.800,00	102.612.800,00	0,00	0,00

7. Rincian mutasi piutang dapat dilihat pada *lampiran 20.1 dan 20.2*.
8. Rincian klasifikasi umur atas piutang dapat dilihat pada *lampiran 21*.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Kenaikan)/Penurunan	%
> Penyisihan Piutang Pendapatan				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(45.657.923.723,63)	(41.615.872.037,67)	(4.042.051.685,96)	9,71
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(7.766.618,06)	(2.047.288,37)	(5.719.329,69)	279,36
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(748.559.234,27)	(851.193.215,91)	102.633.981,64	(12,06)
✓ Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(243.476.651,30)	(205.541.229,15)	(37.935.422,15)	18,46
> Penyisihan Piutang Lainnya				
✓ Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(102.612.800,00)	(102.612.800,00)	0,00	-
Jumlah	(46.760.339.027,26)	(42.777.266.571,10)	(3.983.072.456,16)	9,31

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 21*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa - Asuransi Dibayar Dimuka	63.512.213,30	67.302.015,37	(3.789.802,07)	(5,63)
Beban Jasa - Sewa Dibayar Dimuka	177.398.492,92	142.583.270,00	34.815.222,92	24,42
Beban Jasa - Ketersediaan Layanan (Hosting)	666.666,67	1.166.666,70	(500.000,03)	42,86
Jumlah	241.577.372,88	211.051.952,07	30.525.420,82	14,46

Penjelasan:

Beban Dibayar Dimuka disebabkan karena belanja sewa tanah dan bangunan serta pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh beberapa OPD atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang melewati TA 2022.

Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran 22*.

5.3.1.1.5 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan Barang Pakai Habis	25.769.765.102,16	28.385.411.068,64	(2.615.645.966,48)	(9,21)
Jumlah	25.769.765.102,16	28.385.411.068,64	(2.615.645.966,48)	(9,21)

Penjelasan:

1. Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, barang cetakan, barang kuasi, benda pos, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, material/obat/alkon, bahan bakar minyak/gas, pakan ikan, bahan lainnya, bahan makanan/natura dan pakan natura, alat listrik, perabot kantor/alat kebersihan, bibit ikan, bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, dan bahan /kegiatan kantor lainnya. Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran 23*;
2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Karangasem serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
3. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima hibah berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Bali pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp251.056.597,00. Selain itu, juga menerima hibah/sumbangan persediaan barang dari masyarakat/pihak ketiga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang diterima oleh beberapa perangkat daerah terkait yaitu RSUD Karangasem sebesar Rp1.511.284.886,47, Dinas Kesehatan sebesar Rp11.467.716.879,34;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

4. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca 31 Desember 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Kesehatan	Obat dan BMHP	379.235.720,13.
RSUD Karangasem	Obat dan BMHP	4.460.713,30
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Kontrasepsi	4.055.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Barang cetakan	101.662.792,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Plat IMB	300.000,00
Dinas Pariwisata	Karcis retribusi	1.099.400,00
Jumlah		490.814.225,43

- Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 melaksanakan pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang kedaluwarsa dan rusak bulan Januari s.d Desember 2022 yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2023 dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 442/116/Dinkes perihal Permohonan Ijin Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Kadaluwarsa dan rusak Bulan Januari s/d Desember 2022 tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp379.235.720,13;
- Pada RSUD Kabupaten Karangasem terdapat barang berupa obat dan bahan medis yang telah kadaluwarsa sebesar Rp4.460.713,30 dan telah dilakukan proses pemusnahan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Obat-obatan dan Bahan Medis Pakai habis Kadaluwarsa/Rusak di RSUD Kabupaten Karangasem;
- Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat barang berupa alat kontrasepsi yang telah kadaluwarsa sebesar Rp4.055.600,00. Telah diusulkan pemusnahan dan penghapusan melalui Surat Nomor: 476/521/DPPKB/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan belum ada persetujuan pemusnahan maupun penghapusan atas usulan tersebut;
- Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat barang cetakan atas dokumen catatan sipil yang tidak berlaku sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp101.662.792,00 sudah dilakukan pemusnahan barang sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Nomor: 027/179/Disdukcapil tanggal 13 Maret 2020 namun belum ada SK Penghapusan;
- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) plat dengan nilai sebesar Rp300.000,00. Persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku telah dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2022. Usulan hapus atas plat IMB tersebut sudah dilaksanakan namun belum ada SK Penghapusan dan pemusnahan atas persediaan tersebut; dan
- Pada Dinas Pariwisata terdapat enam jenis karcis masuk tempat wisata yang sudah rusak sebesar Rp1.099.400,00 namun belum dimusnahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Karcis	Harga/Lembar (Rp)	Nilai (Rp)
Karcis Tulamben			
▪ WNA Anak	1.900	239,00	454.100,00
▪ WNI Dewasa	300	239,00	71.700,00
▪ WNI Anak	400	239,00	95.600,00
Karcis Padang Bai			
▪ WNI Dewasa	400	239,00	95.600,00
▪ WNI Anak	1.600	239,00	382.400,00
Jumlah			1.099.400,00

Dinas Pariwisata sudah menyampaikan surat permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor: 700/1628/Dispar tanggal 24 Juni 2019 namun belum mendapat persetujuan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	4.290.537.515,71	4.290.537.515,71	0,00	0,00
Investasi Permanen	118.679.728.424,42	116.674.507.269,08	2.005.221.155,34	1,72
Jumlah	122.970.265.940,13	120.965.044.784,79	2.005.221.155,34	1,66

5.3.1.2.1 Investasi Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	208.297.940,00	248.612.789,00	(40.314.849,00)	(16,22)
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen				
- Penyisihan Dana Bergulir	(208.297.940,00)	(248.612.789,00)	40.314.849,00	(16,22)
- Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	(7.141.699.003,29)	(7.141.699.003,29)	0,00	0,00
Jumlah	4.290.537.515,71	4.290.537.515,71	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Penjelasan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

- Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada tahun 2009. Sejak Tahun 2010, Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna Dana Bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga Dana Bergulir yang diberikan menjadi macet. Hal tersebut menjadi piutang atas investasi Dana bergulir yang tidak bisa tertagih (macet);
- Dalam pengelolaan Dana Bergulir terjadi permasalahan hukum. Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Permintaan Keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan Nomor 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00;
- Pada Tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2022 proses tersebut masih berlangsung dan belum diterbitkan rekomendasi penghapusan Dana Bergulir;
- Mutasi penerimaan dana bergulir sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun	Mutasi Saldo Dana Bergulir			Pembayaran		
	Saldo Laporan KPKNL	Saldo Neraca Pemda	Selisih	Menurut KPKNL	Menurut Pemda	
					Penerimaan Pembiayaan Pengembalian Dana Bergulir - LRA	Surat Keterangan Lunas
2017	341.700.106,08	290.219.129,08	51.480.977,00	51.480.977,00	51.480.977,00	0,00
2018	290.219.129,08	267.549.150,00	22.669.979,08	52.734.828,08	22.669.979,08	30.064.849,00
2019	267.549.150,00	251.826.425,00	15.722.725,00	25.972.725,00	15.722.725,00	10.250.000,00
2020	251.826.425,00	248.612.789,00	3.213.636,00	3.213.636,00	3.213.636,00	0,00
2021	248.612.789,00	248.612.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208.297.940,00	208.297.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- e. Penyisihan atas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Perbup Karangasem Nomor 43 Tahun 2022, dimana investasi nonpermanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 (empat) tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

2. Penjelasan Investasi Non-Permanen – Investasi Dalam Proyek Pembangunan

- a. Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2022 dan 2021 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun;
- b. Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akta Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 – No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah di tetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem;
- c. Pembagian keuntungan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hasil Pengelolaan Bersama yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama; dan
 - 2) Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.
- d. Pada Tahun 2022, dengan melandainya Covid-19 berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Ujung. Untuk penerimaan pendapatan tahun 2022 merupakan bagi hasil usaha tahun 2021 yang mana pada tahun 2021 pandemi covid 19 masih mempengaruhi rendahnya kunjungan wisata ke Taman Ujung. Dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh manajemen pendapatan yang diterima pada Tahun 2021 dengan pencermatan kondisi yang ada pada pengelolaan Taman Sukasada Ujung hanya bisa menutupi belanja yang vital saja sehingga belum menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan baik kepada Pemerintah Daerah maupun Puri Karangasem;
- e. Penyisihan investasi diperhitungkan dari penyeteroran bagian hasil untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Taman Ujung yang mengurangi nilai investasi dikarenakan sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkaptalisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi. Penyetoran bagi hasil keuntungan dari Taman Ujung sejak pertama kali disetor adalah sebagai berikut:

Uraian	Hasil Investasi	Nilai Sisa Investasi
Nilai investasi dalam proyek pembangunan diukur dari Tahun 2009		11.432.236.519,00
Hasil investasi yang diterima sejak Tahun 2009 atas PKS Nomor 21 tanggal 11 Januari 2001 antara Puri Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah:		
Hasil investasi tahun setor 2009	53.843.892,00	
Hasil investasi tahun setor 2010	82.249.500,00	
Hasil investasi tahun setor 2011	96.420.000,00	
Hasil investasi tahun setor 2012	121.570.386,00	
Hasil investasi tahun setor 2013	178.557.548,00	
Hasil investasi tahun setor 2014	356.201.584,00	
Hasil investasi tahun setor 2015	523.835.612,00	
Hasil investasi tahun setor 2016	795.210.711,00	
Hasil investasi tahun setor 2017	771.863.297,00	
Hasil investasi tahun setor 2018	910.489.536,00	
Hasil investasi tahun setor 2019	1.509.810.570,91	
Hasil investasi tahun setor 2020	1.741.646.366,38	
Hasil investasi tahun setor 2021	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2022	0,00	
Jumlah hasil investasi sampai dengan tanggal neraca		(7.141.699.003,29)
Nilai Sisa Investasi yang Dapat Direalisasikan		4.290.537.515,71

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. BPD Bali	41.050.000.000,00	40.300.000.000,00	750.000.000,00	1,86
PT. Jamkrida Bali Mandara	2.075.000.000,00	1.825.000.000,00	250.000.000,00	13,70
Perumda Tirta Toh Langkir	75.554.728.424,42	74.549.507.269,08	1.005.221.155,34	1,35
Jumlah	118.679.728.424,42	116.674.507.269,08	2.005.221.155,34	1,72

Penjelasan:

1. PT. BPD Bali:

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali per 31 Desember 2022 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali sebesar 2,17% dari keseluruhan modal PT. BPD Bali. Penyertaan pada PT. BPD Bali sebesar Rp41.050.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp750.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp8.902.529.172,68 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 1 Maret 2022 untuk Tahun Buku 2021 sesuai Berita Acara Nomor : 0271/BA/DIR/OKA/2022 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2021.

2. PT. Jamkrida Bali Mandara:

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2022:

No	Uraian	Jumlah	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2011	75.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
2	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2017	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017
3	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2018	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018
4	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2019	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2019
5	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2021	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2021
6.	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2022	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
Jumlah		2.075.000.000,00	

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp12.498.951,00 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 11 April 2022 untuk Tahun Buku 2021 dari perhitungan pemilik saham sebesar 1,23% sesuai Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 3 tanggal 11 Maret 2022.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yaitu **metode biaya (cost method)**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

3. Perumda Tirta Tohlangkir:

Pada Tahun 2022 terjadi penambahan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Tahun 2021 yaitu Rp74.549.507.269,08 disebabkan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir TA 2022 tanggal 3 Desember 2021 menjadi Rp75.549.975.094,09. Perumda Tirta Tohlangkir untuk Tahun Buku 2022 memperoleh Laba sebesar Rp880.899.054,34. Namun, laba tersebut tidak meningkatkan ekuitas Pemerintah di PDAM, dikarenakan adanya koreksi atas keuntungan tahun lalu sebesar Rp789.646.589,00 dan adanya pembagian keuntungan tahun lalu sebesar Rp406.364.440,23 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2022 didasarkan pada Surat Persetujuan Bupati Karangasem Nomor 900/3044/EkBang/Setda tanggal 28 Desember 2022 serta Perda Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih Perumda Tirta Toh Langkir. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2021 berdasarkan Laporan Auditor KAP Thanjo, Machdjud Modopuro sebesar Rp738.480.800,41 dikalikan 55% sesuai dengan ketentuan di atas.

Perumda Tirta Tohlangkir didirikan berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PDAM. Karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem maka penyertaan modal pada PDAM Tirta Tohlangkir diakui dengan **metode ekuitas (equity method)**.

Berikut perhitungan pengakuan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perumda Tirta Tohlangkir sampai dengan 31 Desember 2022:

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	69.100.547.648,68
Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya	5.680.195.396,00
Modal hibah	1.245.250.466,00
Cadangan umum	3.809.577.767,83
Cadangan dana sosial dan pendidikan	1.561.492.094,69
Akumulasi kerugian s.d. tahun lalu	(6.727.987.333,45)
Laba/rugi tahun berjalan (<i>audited</i>)	885.652.384,67
Nilai Investasi pada Perumda Tirta Toh Langkir Karangasem	75.554.728.424,42

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem *sama dengan* nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Tohlangkir dalam laporan keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Auditor KAP Thanjo, Machdjud Modopuro No.00006/3.0395/AU.2/11/0822-2/1/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan opini Wajar.

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	162.717.247.945,25	161.485.813.857,25	1.231.434.088,00	0,76
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	559.607.671.676,39	532.570.887.138,68	27.036.784.537,71	5,08
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	888.885.578.530,53	858.295.925.089,48	30.589.653.441,05	3,56
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.464.775.325.242,76	1.404.299.729.701,16	60.475.595.541,60	4,31
Aset Tetap Lainnya	39.697.000.877,35	39.299.650.112,35	397.350.765,00	1,01
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.170.335.680,96	12.960.612.710,00	1.209.722.970,96	9,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.956.649.602.082,39)	(1.844.085.591.786,38)	(112.564.010.296,01)	6,10
Jumlah	1.173.203.557.870,85	1.164.827.026.822,54	8.376.531.048,31	0,72

Penjelasan:

- Pemerintah Kabupaten Karangasem baru menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ekstrakompabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakompabel;
- Penggunaan SIMDA BMD dalam penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 mengakibatkan adanya kesalahan klasifikasi pada tingkat sub-sub rincian objek aset tetap peralatan dan mesin yang mana adanya pengakuan aset sebagai berikut:
 - Pengakuan *Distiling Apparatus* dengan kodefikasi BMD 1.3.2.08 (Alat Laboratorium) yang seharusnya diakui dengan kodefikasi BMD 1.3.2.10 (Komputer); dan
 - Pengakuan Alat *Degreening* Jeruk Kap 110 Kg dengan kodefikasi BMD 1.3.2.08 (Alat Laboratorium) yang seharusnya diakui dengan kodefikasi BMD 1.3.2.5 (Alat Kantor dan Rumah Tangga).
- Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menguasai aset-aset yang berasal dari proses penegerian 8 (delapan) unit TK Swasta. Namun, aset-aset yang dikuasai tersebut pada tahun 2022 telah dilakukan inventarisasi namun belum dicatat dalam KIB karena belum ditemukan harga perolehan dari aset – aset tersebut. Inventarisasi aset juga dilakukan terhadap 1 (satu) unit TK Negeri namun belum dicatat dalam KIB karena belum ditemukan harga perolehan dari aset-aset tersebut;
- Berdasarkan data hasil inventarisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah diketahui sebagai berikut:
 - Pengembang perumahan yang telah diinventarisasi sebanyak 35 pengembang;
 - Terdapat 10 (sepuluh) pengembang yang asetnya telah tercatat dalam Daftar Aset Pemda, 21 pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan 3 (tiga) pengembang dalam proses penyerahan PSU , sudah selesai pada tahun 2023 dan 1 (satu) pengembang dalam tahap proses Berita Acara Serah Terima pada tahun 2023;
- Atas aset tetap yang diperoleh di Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki jaminan pemeliharaan yang belum jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.888.143.651,20 dengan penerbit jaminan sebagian besar PT Jamkrida Bali Mandara;
- Pada tahun 2022 aset dibawah nilai kapitalisasi (*extracomtable*) yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, BLUD, Puskesmas dan sekolah atas semua jenis aset tetap dengan nilai Rp35.079.912.463,97; dan
- Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai tahun 2022 belum memiliki aset tetap dengan kategori aset Property Investasi.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	162.717.247.945,25	161.485.813.857,25	1.231.434.088,00	0,76

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
Saldo Awal	161.485.813.857,25
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	0,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penilaian	0,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	1.488.181.738,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.488.181.738,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih/Double Catat	(13.547.650,00)
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(243.200.000,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	(256.747.650,00)
Saldo Akhir	162.717.247.945,25

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 24.

2. Progres pelaksanaan sertifikasi Aset tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai dengan akhir tahun 2022 seperti pada rincian berikut:
 - a. Aset tanah jalan secara keseluruhan terdapat 575 ruas jalan dengan luas total 7.588.924,36 m² memiliki nilai Rp.75.689.162.002,00. Dalam tahun 2022 telah berhasil diterbitkan sertifikat sebanyak 632 sertifikat. Dari jumlah sertifikat tersebut sebanyak 632 sertifikat sudah dimasukkan kedalam 143 ruas jalan, sehingga total 318 (175+143) ruas jalan sudah bersertifikat; dan
 - b. Aset tanah non jalan seluruhnya berjumlah 657 bidang dengan luas 1.572.687,23 m² memiliki nilai Rp109.384.873.856,00, dalam tahun 2022 berhasil disertifikatkan 10 bidang sehingga aset tanah non jalan yang belum bersertifikat menjadi 220 bidang dengan total luas 485.454,81 m² memiliki nilai Rp22.401.596085,00.
3. Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Tahun 2022 menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Bali berupa 37 Bidang Tanah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem, dengan total Luas 125.915 m², nilai Rp.967.596.820,00 dan sudah dicatatkan dalam aplikasi Simda BMD.

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	559.607.671.676,39	532.570.887.138,68	27.036.784.537,71	5,08

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	532.570.887.138,68
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	47.219.074.193,50
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	16.850.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	1.247.817.700,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	878.625.999,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	55.500.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	886.277.482,00
✓ Kurang catat	0,03
- Mutasi antar Perangkat Daerah	3.805.382.300,00
Jumlah Mutasi Tambah	54.109.527.674,53
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	0,00
- Pengakuan Ekstrakompabel	(1.312.361.173,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(186.576.630,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(21.625.665.033,80)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
✓ Lebih Catat	(0,02)
- Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta	(142.758.000,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(3.805.382.300,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(27.072.743.136,82)
Saldo Akhir	559.607.671.676,39

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 25*.

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	888.885.578.530,53	858.295.925.089,48	30.589.653.441,05	3,56

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	858.295.925.089,48
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	32.102.107.210,05
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	272.310.250,00
- Penerimaan Hibah Tahun berjalan	178.422.525,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	460.934.315,24
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	452.960.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Tambah	33.466.734.300,29
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	(1.183.768.071,00)
- Pengakuan Extracomptable	(49.604.589,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(984.482.257,24)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(659.225.942,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
✓ Lebih Cacat	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	(2.877.080.859,24)
Saldo Akhir	888.885.578.530,53

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 26*.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.464.775.325.242,76	1.404.299.729.701,16	60.475.595.541,60	4,31

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.404.299.729.701,16
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	59.535.424.292,60
- Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	6.224.880,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	406.350.324,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.403.866.545,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	
Jumlah Mutasi Tambah	62.351.866.041,60
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.876.270.500,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
Jumlah Mutasi Kurang	(1.876.270.500,00)
Saldo Akhir	1.464.775.325.242,76

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 27*.

- Sesuai Keputusan Bupati Karangasem Nomor 595/Hk/2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Ruas Jalan di Kabupaten Karangasem dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 575 ruas jalan dengan jumlah total 1.202,54 km¹. Atas ruas jalan tersebut sudah semua dilakukan penilaian dan pencatatan BMD.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	39.697.000.877,35	39.299.650.112,35	397.350.765,00	1,01

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	39.299.650.112,35
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	451.461.989,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	48.904.125,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	37.023.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Tambah	537.389.114,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(70.621.999,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(68.416.350,00)
- Belanja Modal Tahun Berjalan yang diserahkan ke sekolah swasta	(1.000.000,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Kurang	(140.038.349,00)
Saldo Akhir	39.697.000.877,35

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 28.

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.170.335.680,96	12.960.612.710,00	1.209.722.970,96	9,33

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	12.960.612.710,00
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.774.532.600,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.862.756.712,24
- Utang Belanja	97.688.843,96
Jumlah Mutasi Tambah	3.734.978.156,20
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.525.255.185,24)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.525.255.185,24)
Saldo Akhir	14.170.335.680,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan bertambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas utang Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut :
- Rekonstruksi Jalan ruas jalan Purwayu-Telaga Mas dengan Nomor Kontrak 602.1/2030/BM/DPUPR/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Nilai Kontrak 1.590.816.000,00, Addendum 1 Nomor : 602.1/2317/BM/DPUPR/2022 tanggal 12 September 2022, Surat Nomor 602.1/4684/BM/DPUPR/2022 Perihal ; Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dan Surat Pernyataan Nomor : 28/WJ.A/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp1.113.571.200,00, yang berdasarkan Berita Acara Fisik Pekerjaan baru selesai sebesar 31,096% atau Rp494.680.143,36. Namun atas pekerjaan tersebut baru diselesaikan pembayarannya sebesar Rp477.244.800,00. Dan atas selesih tersebut masih dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah sebesar Rp17.435.343,36; dan
 - Rekonstruksi Jalan ruas jalan Muntig - Sukaluwih Nomor Kontrak 602.1/2631/BM/DPUPR/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Nilai kontrak Rp1.849.159.000,00, Addendum 1 nomor : 602.1/2383/BM/DPUPR/2022 tanggal 28 Nopember 2022, Surat Nomor : 602.1/5373/BM/DPUPR/2022 tanggal 19 September 2022, Addendum II nomor : 602.1/5375/BM/DPUPR/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal : pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan serta Surat Pernyataan Nomor 35/PK.A/XII/2022 pernyataan tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp1.294.411.300,00 yang berdasarkan Berita Acara Fisik Pekerjaan baru selesai sebesar 34,34% atau Rp635.001.200,60. Namun atas pekerjaan tersebut baru diselesaikan pembayarannya sebesar Rp554.747.700,00. Dan atas selesih tersebut masih dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah sebesar Rp80.253.500,60.

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 29*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Kenaikan)/Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(419.507.993.382,91)	(402.486.280.165,90)	(17.021.713.217,01)	4,23
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(386.664.596.283,00)	(356.019.300.984,00)	(30.645.295.299,00)	8,61
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.150.477.012.416,48)	(1.085.580.010.636,48)	(64.897.001.780,00)	5,98
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	(1.956.649.602.082,39)	(1.844.085.591.786,38)	(112.564.010.296,01)	6,10

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.844.085.591.786,38)
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Beban Penyusutan	(133.812.520.976,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(217.055.733,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	(291.728.695,01)
✓ Akm. atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	(194.026.790,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(3.489.192.300,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(138.004.524.494,01)
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	21.941.780.044,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	9.541.854,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	3.489.192.300,00
Jumlah Mutasi Kurang	25.440.514.198,00
Saldo Akhir	(1.956.649.602.082,39)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 30*.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Cadangan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-

5.3.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.690.189.416,00	24.446.989.416,00	243.200.000,00	0,99
Aset Tidak Berwujud	225.950.521,00	245.754.604,00	(19.804.083,00)	(8,06)
Aset Lain-Lain	23.043.994.367,18	23.043.776.353,05	218.014,13	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.513.131.411,00		2.513.131.411,00	100
Jumlah	50.473.265.715,18	47.736.520.373,05	2.736.745.342,13	5,73

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kerjasama Pemanfaatan	27.513.879.937,00	27.270.679.937,00	243.200.000,00	0,99
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(2.823.690.521,00)	(2.823.690.521,00)	0,00	-
Jumlah	24.690.189.416,00	24.446.989.416,00	243.200.000,00	0,99

Penjelasan:

Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	31 Desember 2022
Tanah	23.667.523.000,00
Peralatan dan Mesin	3.410.097.937,00
Gedung dan Bangunan	436.259.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.614.607.521,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(209.083.000,00)
Jumlah	24.690.189.416,00

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	377.603.000,00	326.603.000,00	51.000.000,00	15,62
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(151.652.479,00)	(80.848.396,00)	(70.804.083,00)	87,58
Jumlah	225.950.521,00	245.754.604,00	(19.804.083,00)	(8,06)

Penjelasan:

Rincian perangkat daerah yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	80.003.000,00	(20.367.479,00)	59.635.521,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.800.000,00	(13.160.000,00)	5.640.000,00
Dinas Perhubungan	122.100.000,00	(67.155.000,00)	54.945.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	67.700.000,00	(12.636.667,00)	55.063.333,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Karangasem	20.000.000,00	(333.333,00)	19.666.667,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Subagan	24.000.000,00	(8.000.000,00)	16.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.000.000,00	(30.000.000,00)	15.000.000,00
Jumlah	377.603.000,00	(151.652.479,00)	225.950.521,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Aset Lain - Lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak yang akan Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	-
Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	0,00	0,00	0,00	-
Ternak Guliran dan Tanaman	2.015.034.366,00	2.015.034.366,00	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	2.408.049.605,81	2.408.049.605,81	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	18.216.835.195,37	18.155.712.181,24	61.123.014,13	0,34
Aset Tetap yang akan Dihapuskan Selain Rusak Berat	223.336.000,00	223.336.000,00	0,00	0,00
Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut	180.739.200,00	241.644.200,00	(60.905.000,00)	(25,20)
Jumlah	23.043.994.367,18	23.043.776.353,05	218.014,13	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Penjelasan:

1. Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo piutang bersih pajak yang dapat direalisasikan dan direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2022 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2022) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rincian piutang pajak yang akan dihapuskan dapat dilihat pada *lampiran 31*.

2. Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo tagihan piutang bersih atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2022) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Tagihan atas pembayaran sewa Taman Wisata Putung sampai akhir Tahun 2020 belum dilaksanakan usulan penghapusan.

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), dan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu. Sampai dengan tanggal neraca (31 Desember 2022, belum ada penyelesaian tunggakan sewa tersebut di atas.

3. Ternak Guliran dan Tanaman:

Jumlah sebesar Rp2.015.034.366,00 merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00. Atas ternak yang digulirkan dari Tahun 2003, pada tahun 2022 tidak terjadi penagihan dan perguliran kembali kepada petani. Rincian dari Guliran Ternak sesuai rincian dibawah:

Tahun Pemberian	Jenis Ternak	Saldo 31 Desember 2022	
		Jumlah	Nilai
2003	Sapi	36	62.947.500,00
2004	Sapi	16	38.325.000,00
2005	Sapi dan Kambing	30	18.050.000,00
2006	Sapi dan Kambing	34	58.650.000,00
2007	Sapi, Kambing dan Babi	658	915.089.110,00
2008	Sapi, Kambing, Babi, Itik dan Ayam	4.425	899.103.756,00
Jumlah		5.199	1.992.165.366,00

4. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan:

Jumlah sebesar Rp2.408.049.605,81 merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2022. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah swasta
Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Rusak berat sekolah swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	0,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah swasta
Gedung dan Bangunan	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat sekolah swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	0,00	Sekolah swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST
Dinas PUPR dan Perkim				
Jalan, Irigasi dan Jaringan	408.079.000,00	341.172.833,33	66.906.366,67	Akan diserahkan ke Desa
	24.216.792.751,99	24.057.184.639,49	159.608.112,50	Akan diserahkan ke Provinsi Bali
Jumlah	29.271.588.390,99	26.863.538.785,18	2.408.049.805,81	

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga telah mengadakan penelusuran ke sekolah-sekolah swasta yang menerima aset dan mengintruksikan kepada penerima untuk memohon hibah yang hingga akhir Tahun 2022 sudah ditindaklanjuti oleh sebagian besar penerima hibah tersebut.

Untuk aset pada Dinas Perikanan, telah dilaksanakan penelusuran atas Aset Gedung dan Bangunan tersebut, pihak pengguna yaitu kelompok nelayan menyatakan keinginan untuk memohon hibah aset tersebut. Namun terdapat pertimbangan bahwa tujuan awal dari pengadaan bangunan tersebut adalah sebagai balai pengawasan dimana kelompok nelayan tidak memiliki fungsi pengawas sehingga permohonan hibah masih perlu di pertimbangkan.

Untuk aset jalan yang akan diserahkan ke desa yang tercatat pada Dinas PUPR pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp408.079.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp341.172.833,33 dan nilai buku sebesar Rp66.906.366,67.

Dinas PUPR pada Tahun 2022 telah melakukan proses koordinasi dengan Provinsi Bali terkait aset JIJ yang akan diserahkan ke Provinsi Bali dengan nilai Rp24.216.792.751,00, atas hal tersebut diketahui bahwa Provinsi Bali sudah melakukan pencatatan aset JIJ tersebut. Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.29.028/12221/SEKRET/PUPRKIM tanggal 18 Juli 2022 dilakukan proses permohonan penghapusan aset pada DPUPR Kabupaten Karangasem dengan surat Kepala DPUPR Kabupaten Karangasem Nomor : 028/1733/SEKRET/DPUPR/2022 tanggal 25 Juli 2022 kepada Bupati Karangasem Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem selaku Pengelola Barang Milik Daerah perihal mohon penghapusan barang milik daerah. Surat Keputusan penghapusan aset tersebut baru terbit pada tahun 2023 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7/KPTS/HK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem tanggal 26 Januari 2023.

5. Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat:

Jumlah sebesar Rp18.216.835.195,37 merupakan saldo nilai buku Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2022. Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat per perangkat daerah dapat dilihat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

pada lampiran 32. Atas aset tetap dalam kondisi rusak berat sudah dilakukan pengajuan usulan penghapusan, progres sampai dengan 2022 sudah dibentuk Tim Teknis Penghapusan BMD.

6. Aset Tetap akan Dihapuskan Selain Rusak Berat:

Jumlah sebesar Rp223.336.000,00 merupakan saldo Aset Tetap yang akan dihapuskan dalam kondisi selain rusak berat per 31 Desember 2022. Atas aset tetap akan dihapuskan selain rusak berat tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp223.336.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pasar Bebandem dan Pasar Seni Manggis yang berupa perencanaan (DED) yang di alihkan status penggunaannya/pindahan dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Pemerintah kabupaten Karangasem belum mengambil kebijakan untuk menghapus DED tersebut walau perencanaan tersebut kemungkinan tidak dapat dilanjutkan mengingat pembangunan telah dilaksanakan dengan perencanaan yang berbeda.

7. Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut:

Jumlah sebesar Rp180.739.200,00 merupakan saldo Aset Tanah yang masih perlu penelusuran serta Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi per 31 Desember 2022. Rincian Aset Tetap tersebut per OPD dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tanah	0,00	0,00	0,00	Aset milik provinsi (koreksi pencatatan)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	Aset yang belum dikapitalisasi
Jumlah		207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	

Aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada tahun 2022 dilakukan koreksi pencatatan atas Tanah yang tercatat di Dinas Pertanian namun sertifikat milik atas nama Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp60.905.000,00; dan
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga masih menelusuri dokumen pengadaannya namun belum diketemukan.

5.3.1.5.4 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Aset Lainnya - Dana TDF untuk saldo pokok *Treasury Deposit Facility* Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 sebesar Rp2.513.131.411,00 berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor : S-233/WPB-22/2023 Perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2023, serta surat Nomor : S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas TDF, atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	34.870.688.773,20	47.633.376.850,10	(12.762.688.076,90)	(26,79)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	34.870.688.773,20	47.633.376.850,10	(12.762.688.076,90)	(26,79)

Tidak termasuk saldo Utang Belanja adalah uang Jaminan Reklamasi yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan ditempatkan bentuk Bilyet deposito dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

saldo per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.053.554.150,00. Uang jaminan reklamasi tersebut diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Karangasem, dan dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	302.580.862,00	(302.580.862,00)	(100)
Pendapatan Diterima Dimuka	357.776.816,34	420.916.766,00	(63.139.949,66)	(15,00)
Utang Belanja dan Transfer	34.512.911.956,86	46.869.037.215,74	(12.356.125.258,88)	(26,36)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	40.842.006,36	(40.842.006,36)	(100)
Jumlah	34.870.688.773,20	47.633.376.850,10	(12.762.688.076,90)	(26,79)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Fihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang PPh Pusat	0,00	6.205.383,00	(6.205.383,00)	(100,00)
Utang PPN Pusat	0,00	296.375.479,00	(296.375.479,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	302.580.862,00	(302.580.862,00)	(100,00)

Penjelasan:

Pada tahun 2022 tidak ada transaksi yang menyebabkan Utang Perhitungan Fihak Ketiga dari Entitas Akuntansi.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
➤ Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga				
✓ Pajak Reklame Diterima Dimuka	128.341.317,67	145.159.000,00	(16.817.682,33)	(11,59)
✓ Retribusi IMTA Diterima Dimuka	103.430.000,00	200.434.100,00	(97.004.100,00)	(48,40)
✓ Pendapatan BLUD Diterima Dimuka	48.240.000,00	12.060.000,00	36.180.000,00	300
➤ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa				
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka	77.765.499,67	63.263.666,00	14.501.833,67	22,92
Jumlah	357.776.816,34	420.916.766,00	(63.139.948,66)	(15,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Penjelasan:

Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 34*.

5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
➤ Utang Belanja				
✓ Utang Belanja Pegawai	13.205.581.619,90	34.399.303.778,73	(21.193.722.158,83)	(61,61)
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa	17.714.609.558,00	11.261.619.871,00	6.452.989.687,00	57,30
✓ Utang Belanja Modal	97.688.843,96	0,00	97.688.843,96	-
➤ Utang Transfer				
✓ Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.495.031.935,00	1.208.113.566,01	2.286.918.368,99	189,30
Jumlah	34.512.911.956,86	46.869.037.215,74	(12.356.125.258,88)	(26,36)

Penjelasan:

Atas utang belanja Tahun 2022 didalamnya termasuk utang belanja yang belum dibayarkan atas Belanja Pegawai yaitu belanja Tambahan Penghasilan Pegawai, kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK, insentif pemungutan retribusi, insentif pemungutan pajak, jasa pelayanan serta belanja gaji sebesar Rp13.205.581.619,90 utang barang dan jasa sebesar Rp17.714.609.558,00, utang belanja modal sebesar Rp97.688.843,96 serta utang transfer kepada desa sebesar Rp3.495.031.935,00. Selain itu terdapat koreksi atas saldo utang atas penyajian saldo utang 31 Desember 2022 sebesar (Rp313.975.475,00) yang terdiri dari belanja pegawai (Rp293.059.925,00) serta belanja barang dan jasa (Rp20.915.550,00). Hal tersebut disebabkan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Kebudayaan dan pariwisata tidak dilaksanakan pengamprahan serta kesalahan perhitungan utang.

Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada *lampiran 35 dan 36*.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100)
Utang Jangka Pendek Lainnya - Lainnya	0,00	4.842.006,36	(4.842.006,36)	(100)
Jumlah	0,00	40.842.006,36	(40.842.006,36)	(100)

Penjelasan:

Pada tahun 2022 tidak ada transaksi yang menyebabkan Utang Jangka Pendek Lainnya dari Entitas Akuntansi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	1.567.542.787.384,42	1.541.639.811.645,02	25.902.975.739,40	1,68

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.4*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

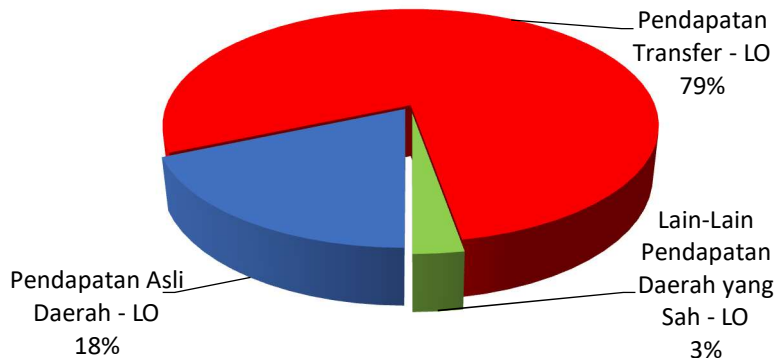
5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Asli Daerah - LO	279.002.926.362,49	285.450.562.639,28
Pendapatan Transfer - LO	1.179.722.788.423,00	1.146.356.465.658,13
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	42.110.368.273,91	147.238.124.229,69
Jumlah	1.500.836.083.059,40	1.579.045.152.527,10

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2022 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Pajak Daerah - LO	174.941.530.503,75	93.535.849.322,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.346.354.586,66	9.378.012.271,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	9.800.680.508,35	10.942.176.265,59
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	83.914.360.763,73	171.594.524.780,69
Jumlah	279.002.926.362,49	285.450.562.639,28

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Hotel - LO	21.768.009.556,00	2.602.950.265,00
Pajak Restoran - LO	10.584.435.629,00	2.597.444.884,00
Pajak Hiburan - LO	64.994.681,00	8.592.042,00
Pajak Reklame - LO	540.734.983,00	483.103.308,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	15.635.109.437,00	13.555.934.891,00
Pajak Parkir - LO	6.337.500,00	2.880.000,00
Pajak Air Tanah - LO	832.641.941,00	731.239.035,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	102.979.527.050,00	54.195.398.176,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9.189.912.453,00	9.155.647.905,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	13.339.827.273,75	10.202.658.816,00
Jumlah	174.941.530.503,75	93.535.849.322,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp6.983.620.678,33 (Rp174.941.530.503,75 - Rp167.957.909.825,42). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	6.983.620.678,33
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum dibayar WP	13.177.886.719,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2022	145.159.000,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak sebelum Tahun 2022 yang telah dibayar WP	(6.211.083.723,67)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang diterima pembayarannya di TA 2022	(128.341.317,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	6.983.620.678,33

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	2.007.261.100,00	1.825.628.400,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	253.147.000,00	251.360.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	210.220.000,00	209.892.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.086.445.000,00	3.592.466.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	526.817.600,00	569.622.150,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	52.055.000,00	41.385.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	817.609.668,00	771.004.008,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	211.831.766,66	227.910.333,00
Retribusi Terminal - LO	127.209.000,00	124.974.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	249.935.000,00	229.953.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	31.080.500,00	30.328.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	804.450.000,00	109.155.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	22.465.000,00	28.620.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	674.468.852,00	807.709.580,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	61.500.000,00	58.500.000,00
Retribusi Izin Trayek - LO	3.355.000,00	4.307.500,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	206.504.100,00	495.197.300,00
Jumlah	10.346.354.586,66	9.378.012.271,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp130.635.470,66 (Rp10.346.354.586,66 - Rp10.215.719.116,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	130.635.470,66
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD Tahun 2022 yang belum dibayar WR	817.609.668,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atas SKRD Tahun 2022 yang belum dibayar WR	7.443.500,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2022	50.103.667,33
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi IMTA yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	200.434.100,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD sebelum Tahun 2022 yang telah dibayar WR	(779.427.464,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang diterima pembayarannya di TA 2022	(62.098.000,67)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi IMTA yang diterima pembayarannya di TA 2022	(103.430.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	130.635.470,66

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	9.800.680.508,35	10.942.176.265,59



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2022 sebesar Rp479.487.944,44 (Rp9.800.680.508,35 – Rp9.321.192.563,91). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	479.487.944,44
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari pengakuan laba usaha PDAM Tahun Buku 2022	885.652.384,67
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembagian tunai atas laba usaha PDAM Tahun Buku 2021 di Tahun 2022	(406.164.440,23)
Jumlah Penjelasan Selisih	479.487.944,44

2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2022 terdiri dari pendapatan operasional diperoleh dari pembagian tunai atas deviden dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode biaya serta pengakuan keuntungan dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode ekuitas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Metode Pencatatan	Pembagian Untung/Rugi BUMD	Tahun 2022
PT BPD Bali	Biaya	Tunai	8.902.529.172,68
PT Jamkrida Bali Mandara	Biaya	Tunai	12.498.951,00
Perumda Tirta Tohlangkir	Ekuitas	Pengakuan Laba	406.164.440,23
Jumlah			9.321.192.563,91

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.841.959.648,45	2.950.057.395,39
Pendapatan Bunga - LO	3.572.916.666,83	1.400.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	296.752.739,11
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	0,00	2.070.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0,00	185.124.604,53
Pendapatan Denda Pajak - LO	2.627.682.475,81	1.123.366.425,00
Pendapatan Denda dan Pengembalian yang sah lainnya-LO	467.561.094,06	0,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	0,00	14.577.031,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	0,00	15.852.378,00
Pendapatan BLUD - LO	75.404.240.878,58	143.629.414.621,66
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	0,00	21.965.409.586,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	11.900.000,00
Jumlah	83.914.360.763,73	171.594.524.780,69

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2022 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp29.923.049.085,72



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

(Rp83.914.360.763,73 - Rp113.838.019.360,25). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(29.923.049.085,72)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum dibayar WP	2.627.682.475,81
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Retribusi atas SKRD Tahun 2021 yang belum dibayar WR	0,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga di BLUD yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	12.060.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang BLUD yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2022 yang pelayanan yang telah diberikan	12.010.131.949,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Jasa Giro atas Remunerasi DBH pada Rekening TDF-TKD yang belum diterima di Kasda di Tahun 2022	609.510,80
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA dalam LO diakui sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap Tahun 2021	(27.470.000,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Denda Pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2022 yang telah dibayar WP di Tahun 2022	(450.346.262,33)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Denda Retribusi yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2022 yang telah dibayar WR di Tahun 2022	(12.049.776,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang BLUD yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2022 yang telah dibayar pihak ketiga di Tahun 2022	(44.035.426.983,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan-BLUD yang diterima pembayarannya di TA 2022	(48.240.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(29.923.049.085,72)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	985.383.807.974,00	1.012.531.391.495,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	194.338.980.449,00	133.825.074.163,13
Jumlah	1.179.722.788.423,00	1.146.356.465.658,13

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Perimbangan - LO		
➤ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	24.455.266.839,00	27.677.029.795,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	699.227.251.816,00	700.663.380.000,00
➤ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	42.965.052.289,00	82.936.341.064,00
➤ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	209.212.342.030,00	142.928.087.636,00
Dana Insentif Daerah - LO	9.523.895.000,00	58.326.553.000,00
Jumlah	985.383.807.974,00	1.012.531.391.495,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2022 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2022 sebesar Rp75.330.578.589,00 (Rp1.060.714.386.563,00 - Rp985.383.807.974,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(75.330.578.589,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF-TKD	2.513.131.411,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas tidak diakuinya penerimaan Dana Desa tahun berjalan sebagai pendapatan operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	(77.843.710.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(75.330.578.589,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	135.189.188.504,00	100.736.744.338,13
Bantuan Keuangan - LO		
➤ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	59.149.791.945,00	33.088.329.825,00
Jumlah	194.338.980.449,00	133.825.074.163,13

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp3.793.542.215,00 (Rp190.545.438.234,00 - Rp194.338.980.449,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	3.793.542.215,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2022	24.347.665.130,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang telah disebabkan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Bali atas pengakuan piutang sebelum Tahun 2022	(20.554.122.915,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	3.793.542.215,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Hibah - LO	17.690.531.815,91	65.724.400.333,88
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	24.419.836.458,00	81.513.723.895,81
Jumlah	42.110.368.273,91	147.238.124.229,69

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.327.068.392,00	65.724.284.106,50
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	14.197.655.182,81	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	1.154.261.892,00	116.227,38
Sumbangan Pihak ketiga	11.546.349,10	0,00
Jumlah	17.690.531.815,91	65.724.400.333,88

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp17.291.985.466,81 (Rp17.690.531.815,91 - Rp398.546.349,10). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	17.291.985.466,81
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2022	17.291.985.466,81
Jumlah Penjelasan Selisih	17.291.985.466,81

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	0,00	73.630.363.100,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO	3.106.064,00	7.883.360.795,81
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.416.730.394,00	
Jumlah	24.419.836.458,00	81.513.723.895,81

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2022 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

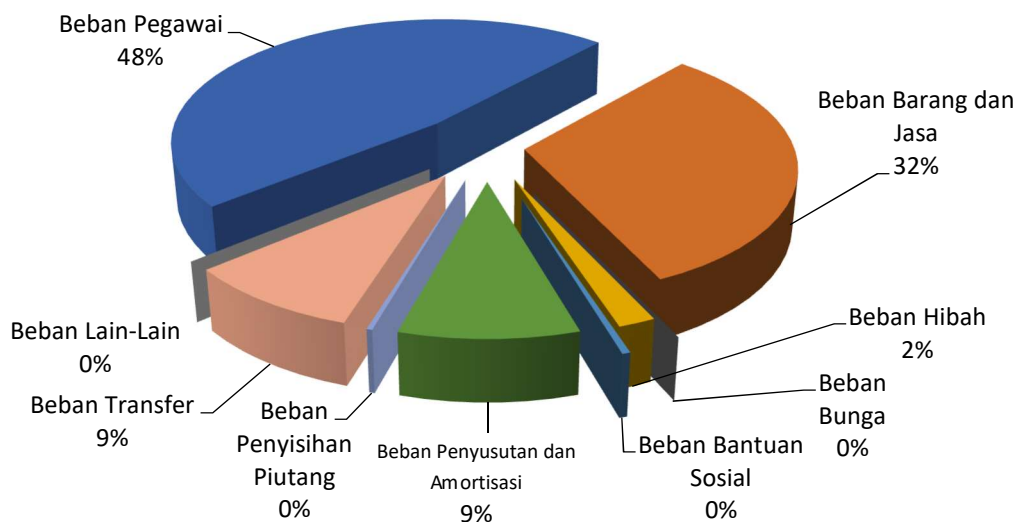
5.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Pegawai	700.849.168.527,72	742.492.885.662,27
Beban Barang dan Jasa	466.445.262.959,41	503.767.328.332,96
Beban Bunga		0,00
Beban Hibah	28.047.094.168,83	9.380.754.598,00
Beban Bantuan Sosial	6.046.980.000,00	5.840.120.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.883.325.059,00	118.717.251.518,50
Beban Penyisihan Piutang	4.303.446.154,26	4.635.773.840,44
Beban Transfer	134.884.851.580,99	106.295.620.778,26
Beban Lain-Lain		0,00
Jumlah	1.474.460.128.450,21	1.491.129.734.730,43

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	423.657.950.461,80	423.912.953.504,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	81.870.044.396,00	103.374.413.849,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.852.919.490,68	135.706.751.725,79
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.306.310.635,00	28.492.437.266,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	834.999.746,97	666.672.357,21
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.350.000,00	787.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	20.478.593.797,27	49.552.656.960,27
Jumlah	700.849.168.527,72	742.492.885.662,27



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2022 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2022 sebesar Rp21.084.491.764,83 (Rp700.849.168.527,72 - Rp721.933.660.292,55). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(21.084.491.764,83)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada perangkat daerah Non-BLUD	6.667.652.506,90
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Karangasem	6.035.944.205,27
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2022 pada perangkat daerah Non-BLUD	(5.796.200.541,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2022 pada BLUD RSUD Karangasem	(27.991.887.936,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(21.084.491.764,83)

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Barang	81.926.145.001,65	123.995.546.567,23
Beban Jasa	207.644.373.401,19	220.959.843.738,43
Beban Pemeliharaan	21.067.183.953,38	18.299.104.693,14
Beban Perjalanan Dinas	20.259.111.009,00	13.631.699.775,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.685.858.825,00	9.807.170.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	56.639.519.327,93	53.570.145.927,46
Beban Barang dan Jasa BLUD	62.223.071.441,26	63.503.817.631,70
Jumlah	466.445.262.959,41	503.767.328.332,96

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2022 sebesar Rp13.632.401.962,65 (Rp466.445.262.959,41 - Rp452.812.860.996,76). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	13.632.401.962,65
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan persediaan TA 2021 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	17.410.826.551,81
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan barang yang diperoleh secara hibah dari pihak ketiga	13.230.058.362,81
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Pakai Habis yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tidak Pakai Habis yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	66.785.114,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa (jasa) yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	2.331.118.059,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa (pemeliharaan) yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	155.830.660,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang telah belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran kas	153.241.118,78
✓ Pengakuan Beban LO karena adanya penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa	17.714.609.558,00
✓ Koreksi ekuitas lebih catat persediaan awal TA 2022	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2022	(11.056.874.790,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar Dimuka, sehingga pengakuan beban dialokasikan secara bertahap	(183.766.539,59)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya kapitasisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan	(2.069.917.730,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan Beban Jasa yang direklasifikasi menjadi Beban Hibah	
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan persediaan yang berasal dari belanja barang TA 2022	(24.119.508.402,16)
Jumlah Penjelasan Selisih	13.632.401.962,65

5.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Bunga	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2022 ini *sama dengan* saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2022.

5.4.2.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.441.816.474,00	2.191.833.260,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.802.484.846,83	6.386.128.490,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	802.792.848,00	802.792.848,00
Jumlah	28.047.094.168,83	9.380.754.598,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp9.682.425.406,83 (Rp18.364.668.762,00 - Rp28.047.094.168,83). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	9.682.425.406,83
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan Beban LO yang berasal dari penyerahan persediaan barang yang kepada masyarakat/pihak ketiga dari Belanja TA 2021 yang diakui sebagai Beban Hibah TA 2022	10.635.780.606,83
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Hibah yang berasal dari reklasifikasi Beban Jasa	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO dikarenakan terdapat Belanja Hibah Barang yang belum diserahkan sampai dengan tanggal Neraca dan diakui sebagai Persediaan Barang	953.355.200,00
Jumlah Penjelasan Selisih	9.682.425.406,83

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	166.980.000,00	50.120.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.880.000.000,00	5.280.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	510.000.000,00
Jumlah	6.046.980.000,00	5.840.120.000,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2022 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2022.

5.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.317.990.295,00	36.563.558.881,10
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.795.830.536,00	30.407.801.433,42
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	64.698.700.145,00	51.700.997.807,98
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	70.804.083,00	44.893.396,00
Jumlah	133.883.325.059,00	118.717.251.518,50

Penjelasan:

1. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2022 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2022 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*; dan
2. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing perangkat daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*, dan juga dapat dilihat pada *lampiran 30*.

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
✓ Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.042.051.685,96	4.249.785.942,76
✓ Beban Penyisihan Piutang Retribusi	5.719.329,69	854.102,57
✓ Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	217.739.716,46	258.006.361,00
✓ Beban Penyisihan Piutang Transfer	37.935.422,15	127.127.434,11
Jumlah	4.303.446.154,26	4.635.773.840,44

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2022 ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar [Rp4.303.446.154,26 - (Rp42.777.266.571,10 - Rp46.760.339.027,26)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	320.373.698,10
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang DBH Propinsi TA 2022	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang LLPAD BLUD TA 2022	320.253.200,34
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang denda retribusi Telekomunikasi TA 2022	120.497,76
Jumlah Penjelasan Selisih	320.373.698,10

5.4.2.8 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	23.162.571.760,99	12.330.248.939,91
Beban Transfer Bantuan Keuangan	111.722.279.820,00	93.965.371.838,35
Jumlah	134.884.851.580,99	106.295.620.778,26

5.4.2.8.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.834.528.276,52	11.135.846.278,38
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.328.043.484,47	1.194.402.661,53
Jumlah	23.162.571.760,99	12.330.248.939,91

Penjelasan:

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2022 ini *lebih besar* dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2022 sebesar Rp2.286.918.368,99 (Rp23.162.571.760,99- Rp20.875.653.392,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.286.918.368,99
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban atas pengakuan Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022	3.495.031.935,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban atas pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 di Tahun 2022	(1.208.113.566,01)
Jumlah Penjelasan Selisih	2.286.918.368,99

5.4.2.8.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	111.722.279.820,00	93.965.371.838,35
Jumlah	111.722.279.820,00	93.965.371.838,35

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2022 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2022 sebesar Rp77.843.710.000,00 (Rp111.722.279.820,00 – Rp189.565.989.820,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(77.843.710.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(77.843.710.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(77.843.710.000,00)

2. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.2.9 Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
✓ Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - Aset Lainnya - LO	27.470.000,00	19.090.000,00
➤ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Jumlah	27.470.000,00	19.090.000,00

Penjelasan:

Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	27.580.667,00
➤ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	27.580.667,00

Penjelasan:

Tidak terjadi Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten tahun 2022.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Luar Biasa	0,00	354.774.361,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2022 ini *sama dengan* saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2022

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2022 dan 2021 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah - LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah - LO	279.002.926.362,49	285.450.562.639,28
✓ Pendapatan Transfer - LO	1.179.722.788.423,00	1.146.356.465.658,13
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	42.110.368.273,91	147.238.124.229,69
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.474.460.128.450,21	1.491.129.734.730,43
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	27.470.000,00	19.090.000,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	27.580.667,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	0,00	354.774.361,00
Jumlah	26.403.424.609,19	87.552.152.768,67

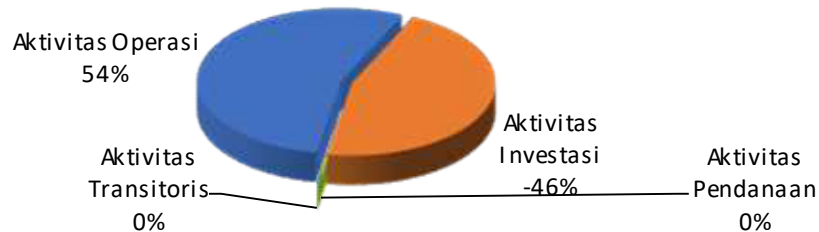
Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.2*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut perubahan Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2022.



Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.577.382.968.958,88	1.555.792.467.854,48
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.409.599.813.263,31	1.403.862.588.362,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	167.783.155.695,57	151.929.879.492,21

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Pendapatan Pajak Daerah - LRA		
✓ Pajak Hotel - LRA	23.092.040.966,00	1.174.092.427,00
✓ Pajak Restoran - LRA	11.378.209.719,00	1.913.140.738,00
✓ Pajak Hiburan - LRA	78.796.577,00	7.132.565,00
✓ Pajak Reklame - LRA	526.388.100,00	494.230.700,00
✓ Pajak Penerangan Jalan - LRA	15.635.109.437,00	13.555.934.891,00
✓ Pajak Parkir - LRA	6.385.500,00	2.880.000,00
✓ Pajak Air Tanah - LRA	918.841.699,00	622.734.492,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	96.437.421.080,67	51.903.906.750,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	6.544.889.473,00	5.790.768.710,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	13.339.827.273,75	10.202.658.816,00
➤ Pendapatan Retribusi Daerah- LRA		
✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.007.261.100,00	1.825.628.400,00
✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	253.147.000,00	251.360.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	210.220.000,00	209.892.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.086.445.000,00	3.592.466.000,00
✓ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	526.817.600,00	569.622.150,00
✓ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	52.055.000,00	41.385.000,00
✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	779.427.464,00	685.593.751,00
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	223.826.100,00	220.696.000,00
✓ Retribusi Terminal - LRA	127.209.000,00	124.974.000,00
✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	249.935.000,00	229.953.000,00
✓ Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	31.080.500,00	30.328.000,00
✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	804.450.000,00	109.155.000,00
✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	22.465.000,00	28.620.000,00
✓ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	667.025.352,00	814.253.580,00
✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	61.500.000,00	58.500.000,00
✓ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	3.355.000,00	4.307.500,00
✓ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	109.500.000,00	411.122.400,00
➤ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	9.321.192.563,91	10.759.415.258,47
➤ Lain-Lain PAD yang Sah- LRA		
✓ Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.841.350.137,65	2.950.057.395,39
✓ Pendapatan Bunga - LRA	3.572.916.666,83	1.400.000.000,00
✓ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	248.352.744,41	296.752.739,11
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	0,00	2.070.000,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	202.676.211,65	183.524.604,53
✓ Pendapatan Denda Pajak - LRA	450.346.262,33	981.252.219,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi - LRA	12.049.776,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian - LRA	15.332.138,00	17.452.378,00
✓ Pendapatan BLUD - LRA	107.465.715.912,58	119.229.486.434,66
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	0,00	21.965.409.586,00
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	0,00	11.900.000,00
✓ Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	1.200.000,00	0,00
➤ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA		
✓ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	21.942.135.428,00	27.677.029.795,00
✓ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	699.227.251.816,00	700.663.380.000,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	42.965.052.289,00	82.936.341.064,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	209.212.342.030,00	142.928.087.636,00
✓ Dana Insentif Daerah - LRA	9.523.895.000,00	58.326.553.000,00
✓ Dana Desa - LRA	77.843.710.000,00	85.289.248.000,00
➤ Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah- LRA		
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	131.395.646.289,00	88.024.000.926,13
✓ Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	59.149.791.945,00	33.088.329.825,00
➤ Pendapatan Hibah- LRA		
✓ Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Pusat - LRA	387.000.000,00	2.673.000.000,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	11.546.349,10	116.227,38
➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LRA		
✓ Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	0,00	73.630.363.100,00
✓ Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	3.106.064,00	7.883.360.795,81
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA	24.416.730.394,00	0,00
Jumlah	1.577.382.968.958,88	1.555.792.467.854,48

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	424.543.362.611,80	426.075.954.929,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	81.870.044.396,00	103.157.887.185,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.096.055.374,78	152.393.858.547,23
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.306.310.635,00	28.492.705.759,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	834.999.746,97	571.114.871,93
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.350.000,00	787.000.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	42.434.537.528,00	32.554.031.290,00
➤ Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	67.944.059.923,50	60.183.032.379,00
✓ Belanja Jasa	206.737.239.492,00	222.204.909.475,50
✓ Belanja Pemeliharaan	20.960.763.293,38	25.192.135.255,74
✓ Belanja Perjalanan Dinas	20.259.111.009,00	13.631.699.775,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.779.418.825,00	9.807.170.000,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	56.203.638.090,16	53.570.145.927,46
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.928.630.363,72	58.394.499.201,00
➤ Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	249.983.214,00	2.191.833.260,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.311.892.700,00	15.092.110.596,83
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	802.792.848,00	802.792.848,00
➤ Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	166.980.000,00	50.120.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.880.000.000,00	5.280.000.000,00
➤ Belanja Tak Terduga		
✓ Belanja Tak Terduga	0,00	2.119.880.311,00
➤ Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
✓ Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	19.563.129.403,00	10.816.925.541,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.312.523.989,00	1.238.161.371,23
➤ Transfer Bantuan Keuangan		
✓ Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	189.565.989.820,00	179.254.619.838,35
Jumlah	1.409.599.813.263,31	1.403.862.588.362,27

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	27.470.000,00	19.090.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	141.808.067.685,15	147.668.862.436,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(141.780.597.685,15)	(147.649.772.436,15)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA		
✓ Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan- LRA	27.470.000,00	19.090.000,00
Jumlah	27.470.000,00	19.090.000,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	41.522.000,00	296.555.050,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	3.828.473.150,00	1.921.992.318,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.500.000,00	656.466.298,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.899.706.488,00	17.175.054.651,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	809.467.900,00	1.095.253.320,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.170.260.904,00	14.550.757.921,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	3.071.359.000,00	618.582.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	21.090.933.174,00	11.640.911.599,63
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	260.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	0,00	79.111.500,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	292.851.577,50	206.263.600,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	84.542.700,00
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	29.254.959.162,05	14.485.759.090,17
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.847.148.048,00	1.126.597.026,35
➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	55.838.342.500,00	59.198.917.612,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	2.059.440.250,00	14.677.567.780,00
✓ Belanja Modal Instalasi	745.900.000,00	858.332.000,00
✓ Belanja Modal Jaringan	891.741.542,60	453.023.600,00
➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	367.085.989,00	445.552.870,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	25.376.000,00	112.096.500,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	3.583.822.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	59.000.000,00	141.703.000,00
➤ Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah	141.808.067.685,15	147.668.862.436,15

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2022. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	276.532.540.451,22	116.552.585.974,63
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	276.532.540.451,22	116.552.585.974,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	5.529.033.225,70	7.011.982.219,00
✓ Pajak Penghasilan	142.404.877.396,72	35.863.751.146,27
✓ Pajak Pertambahan Nilai	78.546.870.719,00	21.333.504.583,36
✓ Tabungan Perumahan Umum	0,00	6.000,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	23.200.134.032,00	23.793.138.866,00
✓ BPJS Kesehatan	23.609.093.128,80	24.533.248.302,00
✓ PFK Lainnya	0,00	410.001.634,00
✓ Iuran JKK	893.321.978,44	893.144.358,06
✓ Iuran JKM	2.268.580.244,56	2.263.204.698,94
✓ BPJS Kesehatan Non ASN	80.629.726,00	450.604.167,00
Jumlah	276.532.540.451,22	116.552.585.974,63

Untuk Tahun 2022, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD dan FKTP Puskesmas. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 37*.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
➤ Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	5.529.033.225,70	7.011.982.219,00
✓ Pajak Penghasilan	142.420.794.221,72	35.863.751.146,27
✓ Pajak Pertambahan Nilai	78.530.823.572,00	21.333.504.583,36
✓ Tabungan Perumahan Umum	0,00	6.000,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	23.200.134.032,00	23.793.138.866,00
✓ BPJS Kesehatan	23.609.093.128,80	24.533.248.302,00
✓ PFK Lainnya	0,00	410.001.634,00
✓ Iuran JKK	893.321.978,44	893.144.358,06
✓ Iuran JKM	2.268.710.566,56	2.263.204.698,94



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
✓ BPJS Kesehatan Non ASN	80.629.726,00	450.604.167,00
Jumlah	276.532.540.451,22	116.552.585.974,63

Untuk Tahun 2022, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, dan FKTP Puskesmas. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 37*.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	167.783.155.695,57	151.929.879.492,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(141.780.597.685,15)	(147.649.772.436,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	26.002.558.010,42	4.280.107.056,06

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	79.947.618.428,19	96.186.075.081,08
Kas di Bendahara Penerimaan	138.005.806,00	151.425.337,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	31.327.854.583,33	5.223.145.957,67
Kas Dana BOS	2.525.986.369,11	4.327.431.952,82
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.248.978.350,31	8.020.258.152,31
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	118.188.443.536,94	113.908.336.480,88

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana BOS di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(856.791,12)	0,00
Jumlah	(856.791,12)	0,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.6.4* di bawah.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33
Kas Dana BOS	400.572.033,56	2.525.986.369,11
Kas Dana Kapitasi di FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	343.422.868,36
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	144.190.144.756,24	118.531.866.405,30

Tahun 2021 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2021 dan pada tahun 2022 telah dilakukan penyelesaian atas utang yang dibayar dari Kas lainnya di Bendahara (selain BUD).

Dalam Dana Saldo Akhir Kas Tahun 2022 tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	1.541.639.811.645,02	1.446.851.883.388,06

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2021 dan 2020 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Surplus/(Defisit) - LO	26.403.424.609,19	87.552.152.768,67

Pada Tahun 2022 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Karangasem masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	662.747.435,98	(9.397.446,76)
Koreksi Ekuitas atas Investasi	(974.266.789,10)	(351.454.764,05)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(439.492.491,00)	9.404.302.239,26
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(60.905.000,67)	(2.036.478.403,81)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	311.467.975,00	228.803.863,65
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	(500.448.869,79)	7.235.775.488,29

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyesuaian.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2022 dan 2021.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Saldo Ekuitas Akhir	1.567.542.787.384,42	1.541.639.811.645,02



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point* 5.3.3.



5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban serta tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Pada Tahun 2022 dunia masih berada dalam situasi pandemi yaitu Covid-19 yang mempengaruhi tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik seluruh dunia termasuk Indonesia. Provinsi Bali khususnya Kabupaten Karangasem termasuk salah satu daerah yang harus menerapkan suatu pola baru dalam kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai dari penyebaran Covid-19 ini. Pemerintahan mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pusat yang harus diikuti oleh daerah. Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2022 adalah:

1. Potensi ketertagihan piutang daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi yaitu Piutang pajak daerah untuk 8 jenis pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, PPJ, dan PBB P2 dengan piutang kondisi per-31 Desember 2022 sekitar 89,05 Milyar, potensi ketertagihan terhadap piutang pajak daerah tersebut secara keseluruhan sekitar 9,04%; dan
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek pada Tahun 2023 masih bisa dilaksanakan walaupun terjadi kebijakan anggaran. Untuk kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menganggarkan di Induk 2023 dan tidak terganggu dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2023.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00" - 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8" - 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km².

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 741 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2022). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gede Dana, S.Pd, M.Si dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH,MA. Tahun 2021 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2021 - 2026.

Pada awal Tahun 2022 terjadi perubahan susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur OPD di mana terdapat beberapa penggabungan urusan dan fungsi OPD, penggantian nama OPD serta pemisahan urusan dan fungsi OPD.

Pada Tahun 2022, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Inspektorat Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketenagakerjaan;
9. Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Karangasem;
27. Kecamatan Kubu;
28. Kecamatan Abang;
29. Kecamatan Bebandem;
30. Kecamatan Selat;
31. Kecamatan Manggis;
32. Kecamatan Rendang; dan
33. Kecamatan Sidemen.

Dalam Tahun 2022, terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang dibidang keuangan.

Amlapura, 5 Mei 2023
BUPATI KARANGASEM
IGEDE DANA.

